

## RENCANA OPERASIONAL 2021

TUJUAN STRATEGIS-1					
Memelihara reputasi dan meningkatkan akuntabilitas PMI sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat nasional maupun internasional.					
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
Outcome 1.1:					
Pemahaman personil PMI dan pemangku kepentingan eksternal tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan organisasi dan program/kegiatan kepalangmerahan meningkat.					
1	Unit kerja diseminasi PMI Pusat, Provinsi dan Kab/Kota berfungsi dengan baik	Adalah PMI Prov, Kab/Kota dan Pusat dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengimplementasi kebijakan diseminasi sesuai , Juklak/Juknis diseminasi yang diterbitkan oleh PMI Pusat</li><li>• Memiliki Pengurus/Staf berkompetensi diseminasi</li><li>• Memiliki focal point diseminasi</li><li>• Memiliki rencana kegiatan diseminasi</li><li>• Mengalokasikan dana untuk diseminasi</li></ul> <u>Kalkulasi:</u> Jumlah unit kerja diseminasi PMI disemua tingkatan yang memenuhi kriteria per uraian indikator	1 Propinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Integrasi alat penilaian kapasitas organisasi</li><li>• Penilaian kapasitas organisasi di bidang diseminasi (baseline)</li><li>• Orientasi Organisasi dan Tatakelola ke-PMI-an</li><li>• Penyusunan alat survey tentang PM</li><li>• Melaksanakan survey kepalangmerahan</li></ul>	MA 52-321-0001
2	% responden yang disurvei oleh PMI Pusat yang memberi umpan balik positif	Responden yang berasal dari lingkungan internal PMI dan eksternal (stakeholder). Memberi umpan balik positif adalah responden yang: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengirim kembali lembar survey yang sudah diisi secara lengkap</li><li>• Mengetahui dan mengetahui PMI secara umum</li><li>• Memberikan saran tentang perbaikan kinerja PMI</li></ul> <u>Kalkulasi:</u> Jumlah responden dengan umpan balik positif berbanding dengan total responden yang mengirim kembali lembar survey.	100%		
Output 1.1.1:					
Perundang-undangan kepalangmerahan didiseminasikan dan disosialisasikan ke semua pemangku kepentingan terkait					
3	Jumlah PMI Prov/Kab-Kota dan Pusat yang melaksanakan sosialisasi per- UU-an, diplomasi kemanusiaan kepalangmerahan dan diseminasi HHI	Kegiatan sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan PMI dalam bentuk seminar, lokakarya dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menyebarkan pemahaman tentang peraturan perundang- undangan kepalangmerahan  Diplomasi kemanusiaan upaya menghimbau para pembuat keputusan dan pemimpin opini untuk bertindak, setiap saat, demi kepentingan orang- orang yang rentan, dan dengan penuh penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan sesuai dengan isu-isu kemanusiaan global terkini (merujuk pada Strategi 2030)	1 Propinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kunjungan sosialisasi secara internal/PMI dan eksternal/stakeholders</li><li>• Kunjungan diplomasi kemanusiaan/Advokasi ke lembaga - lembaga Pemerintah/Non-Pemerintah</li><li>• Seminar/lokakarya implementasi UU ke-PM-an dan Peraturan Pelaksananya</li><li>• Monitoring implementasi UU ke- PM-an dan Peraturan Pelaksananya</li></ul>	MA 52-321-0001

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
		<p>HHI (hukum humaniter internasional) batang tubuh hukum yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, dan hukum kebiasaan internasional yang mengikutinya. HHI menetapkan perilaku dan tanggung jawab negara-negara yang berperang, negara-negara netral, dan individu-individu yang terlibat peperangan, yaitu terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang sipil (tidak bersenjata, bukan pihak yang terlibat perang) yang dilindungi.</p> <p><u>Kalkulasi:</u> Cukup jelas</p>			
4	Jumlah peserta lembaga-lembaga yang memperoleh sosialisasi perundang-undangan dan diplomasi kemanusiaan kepalangmerahan	<p>Adalah peserta lembaga yang menghadiri seminar, lokakarya dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan kepalangmerahan dan orang/pejabat pengambil keputusan yang berkompeten terhadap isu-isu kemanusiaan</p> <p><u>Kalkulasi:</u> Total peserta dari semua lembaga yang menjadi sasaran sosialisasi perundang-undang kepalangmerahan.</p>	500	Diseminasi kepada Lembaga-lembaga baik swasta dan Pemerintah	MA 52-271-0006
<b>Output 1.1.2.</b> Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Diseminasi Kepalangmerahan dan Diplomasi Kemanusiaan yang diperbarui tersedia secara memadai di setiap tingkatan.					
5	Jumlah media KIE Diseminasi Kepalangmerahan yang didistribusikan oleh PMI Pusat/Prov/ Kab/Kota.	<p>Media KIE Diseminasi Kepalangmerahan adalah media komunikasi, informasi, dan edukasi cetak/elektronik yang dikembangkan secara khusus oleh PMI Pusat untuk mendiseminasikan nilai-nilai kepalangmerahan.</p> <p><u>Kalkulasi:</u> Jumlah materi KIE diseminasi kepalangmerahan yang diproduksi untuk didistribusikan kepada stakeholder/kelompok sasaran diseminasi</p>	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meninjau, merevisi dan atau menyusun media KIE Diseminasi Kepalangmerahan sesuai kelompok sasaran (mis. jurnalis, kelompok usia sekolah, usia bekerja).</li> </ul>	MA. 52-241-0005
6	Jumlah lembaga yang memperoleh materi KIE diseminasi ke-PM- an	<p>Adalah lembaga sasaran diseminasi seperti sekolah, lembaga pemerintahan relevan, organisasi sipil masyarakat, lembaga TNI/Polri yang menerima seperangkat materi KIE diseminasi dan mendistribusikannya di lingkungan masing-masing.</p> <p><u>Kalkulasi:</u> Jumlah materi KIE diseminasi kepalangmerahan yang diterima oleh stakeholder/kelompok sasaran diseminasi</p>	10		

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
<b>Output 1.1.3.</b>					
Diseminasi nilai-nilai kemanusiaan dan kepalangmerahan dilaksanakan oleh diseminator PMI yang kompeten di semua tingkatan					
7	Jumlah diseminator HHI di PMI Provinsi/Kab/Kota.	Diseminator adalah personil PMI yang telah lulus pelatihan diseminasi Kepalangmerahan, HHI dan memiliki sertifikat Pelatih/Fasilitator ke-PM-an  <b>Kalkulasi:</b> Total diseminator PMI yang memperoleh sertifikasi kelulusan yang diterbitkan oleh PMI Pusat	40	Jumlah pegWi	MA 52-261-0004
8	Jumlah diseminator PMI Prov/Kab- Kota yang dimobilisasi untuk kegiatan diseminasi kepalangmerahan	Diseminator PMI Prov/Kab-Kota yang ditugaskan oleh induk organisasinya untuk melakukan kegiatan diseminasi di wilayah kerja masing-masing.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah diseminator yang memfasilitasi kegiatan diseminasi yang diinisiasi oleh PMI Pusat/Prov/Kab- Kota. Seorang diseminator dihitung sebagai satu orang walaupun memfasilitasi kegiatan diseminasi lebih dari satu kali.	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilisasi 35 Diseminator PMI</li> <li>Melaksanakan kegiatan diseminasi kepalangmerahan dan HHI</li> </ul>	MA 52-241-0006
<b>Output 1.1.4.</b>					
Kerja sama dengan institusi terkait (TNI, Polri, universitas, sekolah, LSM) dan masyarakat terjaln untuk mendiseminasikan nilai-nilai kemanusiaan dan kepalangmerahan.					
9	Jumlah Mitra yang bekerjasama dengan PMI di bidang diseminasi kepalangmerahan	Mitra diseminasi PMI adalah lembaga TNI/Polri, Perguruan Tinggi, Sekolah Dasar/Menengah, lembaga Non-Pemerintah, Organisasi Sipil Masyarakat yang memiliki rencana menyelenggarakan kegiatan diseminasi nilai-nilai kepalangmerahan dan Hukum Perikemanusiaan Internasional.  <b>Kalkulasi:</b> Total organisasi induk Mitra PMI dalam bidang diseminasi kepalangmerahan yang dicatat oleh PMI Provinsi	35 PMI Kab/Kota Se Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menginisiasi kerjasama diseminasi dengan berbagai pihak di tingkat nasional (Deplu, Kumham, TNI/Polri, Universitas)</li> <li>Identifikasi kebutuhan dan penyusunan materi diseminasi</li> <li>Memobilisasi diseminator PMI/Mitra untuk implementasi kerjasama dengan berbagai pihak.</li> </ul>	MA 52-271-0006
10	Jumlah kegiatan diseminasi yang dilaksanakan Mitra bersama dengan PMI Prov/ Kab/Kota bersama mitra.	Kegiatan diseminasi Kepalangmerahan yang dilakukan dengan oleh PMI Prov/Kab-Kota dan Pusat bekerjasama dengan Mitra terkait.  <b>Kalkulasi:</b> Total jumlah kegiatan diseminasi kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh PMI Provinsi, Kab/Kota se Jateng	11 Event	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan diseminasi di unit-unit mitra</li> <li>Melaksanakan sesi diseminasi pada peringatan hari-hari besar/acara terkait kepalangmerahan.</li> </ul>	

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
<b>Outcome 1.2:</b>					
Jangkauan, kualitas, intensitas dan ketersediaan dokumentasi, publikasi, promosi, dan advokasi kegiatan/pelayanan PMI meningkat.					
11	% Berita tentang organisasi dan kegiatan PMI Provinsi, Kab/Kota yang dikategorikan bersifat positif.	Berita positif PMI adalah pemberitaan yang dipublikasikan oleh media massa (elektronik dan cetak) yang isinya menyatakan sesuatu yang positif mengenai kegiatan layanan PMI  <u>Kalkulasi:</u> Jumlah berita positif yang diterima berbanding jumlah berita yang dikompilasi setiap bulannya	35 PMI Kab/Kota Se Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring pemberitaan tentang PMI oleh PMI Provinsi</li> <li>Analisa pemberitaan tentang PMI oleh PMI Provinsi</li> <li>Penyajian laporan triwulan hasil analisa pemberitaan</li> </ul>	MA 52-241-0004, 52-321-0003
<b>Output 1.2.1:</b>					
Kapasitas staf kehumasan meningkat dengan dilengkapi perangkat dasar kehumasan, media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tersedia secara memadai di PMI semua tingkatan.					
12	Jumlah staf Humas PMI Pusat, Prov/Kab- Kota yang memperoleh pelatihan kehumasan	Staf Markas PMI Prov/Kab-Kota dan Pusat penanggungjawab kegiatan kehumasan yang memperoleh pelatihan teknis kehumasan, baik secara internal maupun eksternal  <u>Kalkulasi:</u> Total jumlah focal point kehumasan PMI Pusat/Prov, Kab/Kota yang mengikuti pelatihan kehumasan internal/eksternal.	36 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan, bantuan teknis kehumasan oleh PMI setingkat di atasnya</li> <li>Monitoring kegiatan kehumasan</li> </ul>	MA 52-241-0007
<b>Output 1.2.2:</b>					
Laporan analisis pemberitaan PMI yang dimuat di media massa (cetak, online, TV, radio) dan media sosial (Twitter dan Facebook) tersedia secara teratur di PMI Pusat/Prov.					
13	Jumlah total berita PMI yang dimuat pada media massa lokal/nasional di Pusat/Prov/ Kab/Kota.	Berita PMI adalah berita tentang kegiatan yang dilakukan atau didukung oleh PMI yang dimuat di media cetak, radio, televisi, dan internet.  <u>Kalkulasi:</u> Total berita yang menggunakan kata kunci "PMI" yang dikompilasi oleh Biro Humas PMI Pusat.	1.000 Berita	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengolah data pemberitaan PMI dari perusahaan jasa pemantau.</li> <li>Analisa trend pemberitaan PMI</li> <li>Menyediakan feedback kepada Pengurus</li> </ul>	MA 52-241-0004
14	Jumlah orang yang dijangkau oleh pemberitaan media massa tentang program/pelayanan PMI	Adalah orang yang mengakses pemberitaan media massa tentang program/pelayanan PMI.  <u>Kalkulasi:</u> Jumlah audiens potensial dari pemberitaan PMI di media cetak, televisi, radio, dan internet.	10.000 Orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun analisa trend pemberitaan PMI</li> </ul>	MA 52-241-0004

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
15	Jumlah pengunjung Laman PMI.	<p>Laman PMI memiliki pengunjung (visitors) dari berbagai negara yang membuka dan membaca berita layanan PMI yang dipublikasikan di <a href="http://www.pmi-jateng.or.id">www.pmi-jateng.or.id</a></p> <p><u>Kalkulasi:</u> Jumlah pengunjung yang tercatat secara otomatis pada laman PMI.</p>	200.000 Visitor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki penampilan dan kapasitas Laman PMI (nasional)</li> <li>• Mengkoneksikan Laman PMI dengan Laman-Laman inisiatif PMI Kab-Kota</li> <li>• Memutakhirkan berita di media PMI (laman, media sosial), dan mendata jumlah pengunjungnya.</li> <li>• Monitoring berita dan informasi yang dimuat dalam Laman PMI</li> <li>• Membuat laporan analisa tentang citra PMI.</li> </ul>	MA 52-241-0004
<p>Output 1.2.3:</p> <p>Produk-produk kehumasan untuk memublikasikan program dan layanan PMI diterbitkan secara reguler kepada masyarakat/publik.</p>					
16	Jumlah produk promosi/publikasi yang didistribusikan oleh PMI Pusat/ Prov/ Kab/Kota.	<p>Produk promosi/publikasi adalah media promosi/publikasi yang memuat informasi kegiatan layanan PMI, baik saat bencana maupun situasi normal. Produk promosi/publikasi dapat berupa event promotion kit (spanduk, giant banner, umbul- umbul, roll banner, backdrop), brosur, poster, multimedia (video), foto, calendar kit (kalender dan agenda), dan majalah.</p> <p><u>Kalkulasi:</u> Cukup jelas</p>	1 Propinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun panduan untuk corporate identity</li> <li>• Menyusun kebijakan publikasi untuk berita, informasi terkait PMI</li> <li>• Memproduksi dan mendistribusikan Warta PMI ke PMI Kab/Kota dan Stakeholder</li> <li>• Membangun jejaring kehumasan dan kerjasama strategis dengan lembaga- lembaga media</li> <li>• Monitoring distribusi materi advokasi dan produk kehumasan ke PMI di daerah</li> <li>• Pendampingan kegiatan kehumasan PMI Prov/Kab-Kota yang memerlukannya</li> </ul>	MA 52-241-0005, 52-241-000
17	TV-PMI memproduksi setidaknya 1(satu) siaran setiap 3(tiga) bulan	<p>Produk TV-PMI adalah siaran tentang kegiatan PMI se Indonesia yang diseleksi menurut kriteria tertentu</p> <p><u>Kalkulasi:</u> Cukup jelas</p>	1 Propinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontributor dalam Pusat melaksanakan riset pra-produksi untuk penentuan topik</li> <li>• Kontributor pada PMI Pusat melaksanakan Asesmen, seleksi lokasi, pemeran sesuai topik</li> <li>• Kontributor pada PMI pusat dalam menyusun disain dan narasi produksi sesuai topik</li> <li>• Kontributor pada PMI pusat dalam Pengambilan gambar, film</li> <li>• Kontributor pada PMI Pusat dalam Produksi</li> <li>• PMI Jateng melakukan Analisa umpan-balik</li> </ul>	MA 52-241-0004

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
<b>Output 1.2.4</b>					
<b>Mekanisme umpan-balik untuk keterlibatan masyarakat dan akuntabilitas diimplementasikan oleh PMI Pusat</b>					
18	Jumlah kegiatan Community Engagement and Accountability (CEA) yang dikelola oleh PMI Pusat	Adalah kegiatan yang menjangkau umpan balik dari penerima manfaat langsung/tidak langsung dalam operasi tanggap darurat bencana tertentu, kesiapsiagaan bencana/pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat, kegiatan layanan/bantuan sosial untuk kelompok rentan tertentu yang mendapat dukungan bantuan donor melalui PMI Pusat.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah kegiatan layanan PMI yang menyertakan layanan CEA	100 Kegiatan di Propinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mensosialisasikan kegiatan layanan PMI</li> <li>Mendorong keterlibatan dan partisipasi penerima manfaat dalam layanan PMI</li> <li>Membangun koneksitas dengan masyarakat/populasi terdampak untuk layanan CEA</li> </ul>	MA 52-211-0002, 52-231-0002
19	Jumlah anggota masyarakat yang memberikan umpan balik CEA melalui saluran media yang dikelola oleh PMI	Anggota masyarakat adalah penerima manfaat langsung/tidak langsung layanan PMI dalam operasi tanggap darurat bencana tertentu, kesiapsiagaan bencana/pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat, kegiatan layanan/bantuan sosial lainnya yang memberikan umpan balik atas layanan-layanan PMI.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah total penerima manfaat langsung/tidak langsung yang memberikan umpan balik CEA terhadap kegiatan layanan PMI.	500 Orang di Propinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun jejaring Komunikasi CEA dengan Penerima Manfaat langsung/tidak langsung, stakeholder;</li> <li>Membangun kapasitas focal point CEA dari PMI setempat;</li> <li>Menginformasikan kepada unit layanan tentang mekanisme umpan balik ;</li> <li>Mengoperasikan Call Center untuk CEA</li> <li>Bekerjasama dengan pusdatin dalam menganalisa umpan balik keluhan.</li> <li>Mengkompilasi umpan balik dan keluhan yang masuk dari seluruh layanan.</li> </ul>	

## RENCANA OPERASIONAL 2021

TUJUAN STRATEGIS-2					
Meningkatkan ketersediaan darah yang aman, mudah dijangkau dan berkualitas di seluruh Indonesia.					
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
<b>Outcome 2.1</b>					
Kapasitas Unit Donor Darah (UDD) yang sesuai standar nasional meningkat.					
20	UDD PMI Prov/Kab- Kota memenuhi standar Good Manufacturing Practice (GMP).	Standar <i>Good Manufacturing Practice</i> (GMP) mencakup semua elemen praktik yang akan menghasilkan produk atau layanan akhir yang dapat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan secara konsisten (Australian Code of GMP 2000). Standar ini merupakan bagian dari upaya penjaminan kualitas yang menjamin bahwa komponen darah diproduksi dan dikontrol secara konsisten berdasarkan standar kualitas yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, mengikuti spesifikasi yang telah ditetapkan (WHO Guidelines on GMP 2011).  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah UDD PMI yang telah mempraktikkan standar GMP	3 UDD PMI Kab Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring implementasi standar GMP pada UDD PMI Prov/Kab- Kota di Jawa Tengah</li> <li>Pelaporan hasil kegiatan standart GMP pada UDD PMI Prov/Kab/Kota.</li> <li>Rapat Koordinasi Bidang UKTD</li> </ul>	MA 52-221-0001, 52-221-0002
21	UDD PMI Prov/Kab- Kota memenuhi Standar Nasional	Standar Nasional mengacu kepada sekumpulan peraturan tentang pelayanan darah yang disusun oleh tim gabungan dari Kemenkes, PMI dan pihak terkait, sesuai standar AABB (American Assosiation Blood Bank), European Guidelines dan WHO.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah UDD PMI yang telah melaksanakan standar CPOB	3 UDD PMI Kab Kota	Monitoring implementasi pengembangan standar nasional pada UDD PMI Prov/Kab- Kota di Jawa Tengah	MA 52-221-0001, 52-221-0002
<b>Output 2.1.1:</b>					
Kebijakan, peraturan, panduan terkait Good Manufacturing Practice (GMP) pelayanan darah tersedia dan diimplementasikan di UDD semua tingkatan.					
22	Jumlah UDD Prov/Kab- Kota dengan Struktur Organisasi sesuai standar.	Standar untuk Struktur Organisasi mengacu kepada Permenkes no.83 tahun 2014 tentang unit transfusi darah, bank darah rumah sakit, dan jejaring pelayanan transfusi darah.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah UDD PMI dengan stuktur organisasi mengacu pada PP No.83/2014	35 UDD PMI Prov/Kab- Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendiseminasikan kebijakan, peraturan, panduan terkait GMP pelayanan darah ke UDD PMI Kab- Kota</li> <li>Monitoring penerapan standar layanan UDD sesuai GMP dan standar nasional</li> </ul>	MA 52-221-0001
23	% UDD Prov/Kab- Kota yang lulus penilaian Pemantapan Mutu Eksternal (PME).	Penilaian Pemantapan Mutu Eksternal (PME) dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan uji saring/uji silang serasi di UDD dengan mengerjakan sampel terstandar  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah UDD PMI yang lulus PME, berbanding dengan total UDD PMI di Jawa Tengah	80% PMI Kab- Kota lulus penilaian PME	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan dokumentasi kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.</li> <li>Monitoring pelaksanaan hasil penilaian Pemantapan Mutu Eksternal (PME)</li> </ul>	MA 52-221-0001

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
<b>Output 2.1.2</b>					
Sistem manajemen UDD, termasuk struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, berjalan dengan baik di semua tingkatan.					
24	UDD Nasional/Prov/Kabupaten/Kota melaksanakan penilaian kinerja pegawai setiap tahun.	Penilaian kinerja dilakukan melalui Data Penilaian Pegawai (DP2).  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah UDD PMI yang melaksanakan penilaian kinerja $\geq 50\%$ dari total pegawainya	35 UDD PMI Kab/Kota dan 1 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring pelaksanaan kinerja pegawai UDD</li> <li>Melaksanakan penilaian kinerja pegawai setiap tahun.</li> </ul>	MA 52-221-0001
25	Jumlah pegawai UDD PMI Prov/Kab- Kota dengan gaji pokok sesuai sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berlaku.	Sistem penggajian PNS menyesuaikan sistem yang berlaku di Prov/Kabupaten/Kota masing- masing.  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	35 UDD PMI Kab/Kota dan 1 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau dan memberikan dukungan ke UDD PMI Kab/Kota untuk menggunakan sistem penggajian sesuai PGPS</li> <li>Melaksanakan pembinaan terkait kebijakan sistem penggajian pegawai</li> </ul>	MA 52-221-0001, 52-321-0001
26	%UDD PMI Prov/Kab- Kota melakukan audit keuangan oleh eksternal setiap tahun.	Audit adalah sebuah pemeriksaan laporan keuangan yang disiapkan oleh PMI untuk memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan yang dilakukan secara independen oleh pihak eksternal.  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	25 UDD PMI Kab/Kota dan 1 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membina keuangan UDD PMI Kab/Kota se Jawa Tengah</li> <li>Monitoring keuangan UDD PMI Kab/Kota se Jawa Tengah</li> <li>Monitoring pelaksanaan audit keuangan eksternal UDD PMI Kab/Kota se Jawa Tengah setiap tahun</li> </ul>	MA 52-221-0001, 52-321-0001
27	%UDD PMI Prov/Kab- Kota memiliki rencana kerja Setiap tahun.	Rencana kerja Setiap tahun adalah rencana kerja yang menggunakan format yang ditetapkan dan memuat informasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tujuan Strategis</li> <li>Outcome, indikator, dan targetnya</li> <li>Output, indikator, dan targetnya</li> <li>Kegiatan-kegiatan</li> <li>Jumlah anggaran per kegiatan dan kategorinya</li> </ul> <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	35 UDD PMI Kab/Kota dan 1 Provinsi	UDD PMI Prov/Kab-Kota se Jawa Tengah menyusun rencana kerja tahunan	MA 52-221-0001, 52-321-0001
28	%UDD PMI Prov/Kab- Kota memiliki laporan tahunan pelaksanaan program/kegiatan.	Laporan pelaksanaan kegiatan Setiap tahun UDD Prov/ Kabupaten/Kota adalah laporan hasil pelaksanaan rencana kerja, yang memuat informasi akan pencapaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>target indikator Outcome target indikator Output</li> <li>penjelasan singkat mengenai pelaksanaan kegiatan</li> </ol> <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	35 UDD PMI Kab/Kota dan 1 Provinsi	UDD PMI Prov/Kab-Kota se Jawa Tengah menyusun laporan pelaksanaan kegiatan setiap tahun	MA 52-221-0001, 52-321-0001



NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
<b>Output 2.1.3</b>					
Mekanisme komunikasi, koordinasi, dan pembinaan berjalan secara konsisten di internal UDD, antar tingkatan UDD, dan dengan pemangku kepentingan eksternal (Pemda, Dinkes, RS, POM Puskesmas, vendor, dll.).					
29	UDD Kab/Kota menerima kunjungan pembinaan dari UDD Provinsi minimal sekali setahun.	Kunjungan pembinaan teknis dari pegawai UDD di tingkat atasnya dapat dilakukan pada berbagai kesempatan dengan menggunakan panduan pembinaan yang ditetapkan.  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	35 UDD PMI Prov/Kab-Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMI Provinsi melakukan kunjungan pembinaan bidang UKTD ke 35 UDD PMI Kab/Kota se Jateng</li> <li>Menerima konsultasi dari UDD PMI Kab/Kota</li> </ul>	MA 52-221-0001, 52-221-0006
<b>Outcome 2.2</b>					
Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana UDD Nasional/Prov/Kabupaten/Kota meningkat.					
30	Jumlah Diklat UDD yang diakreditasi oleh Kemenkes.	Proses pengajuan akreditasi dilakukan dengan melampirkan berbagai persyaratan untuk memperoleh pengakuan standar dari Kemenkes.  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	2 Diklat	Memantau dan mendorong Diklat UDD memenuhi kriteria pengajuan akreditasi oleh Kemenkes	MA 52-32-0001
31	Jumlah pegawai UDD PMI Provinsi yang memenuhi 25 Satuan Kredit Profesional (SKP) dalam 5 tahun.	Satuan Kredit Profesional (SKP) adalah kredit yang harus dikumpulkan oleh para petugas teknis untuk mendapatkan kompetensi sebagai teknis untuk dapat praktek kerja.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah pegawai UDD yang memenuhi 24 SKP 5(lima) tahun terakhir	4 Pegawai	Monitoring dan dokumentasi kinerja teknis UDD	MA 52-221-0001  \\
<b>Output 2.2.1</b>					
Pegawai UDD terlatih dalam menerapkan GMP dan standar nasional sesuai dengan tupoksi dan kompetensi yang diperlukan.					
32	Jumlah pegawai UDD Prov/Kab-Kota yang mengikuti pelatihan GMP.	<b>Kalkulasi:</b> Jumlah pegawai UDD yang mengikuti pelatihan GMP pada tahun pelaporan	50 pegawai	Mendorong UDD PMI Kab-Kota mengikuti Pelatihan GMP	MA 52-221-0001, 52-221-0007
33	Jumlah pegawai UDD Prov/Kab-Kota yang mendapatkan pelatihan minimal sekali setahun.	<b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	50 pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau kinerja pegawai UDD untuk pelatihan UDD</li> <li>Mengupayakan pelatihan yang relevan untuk personil UDD</li> </ul>	

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
Output 2.2.2					
Tenaga Ahli Madya Teknik Transfusi Darah yang kompeten dan professional dihasilkan secara memadai oleh Program D3 Teknologi Transfusi Darah (TTD)					
34	% lulusan Program D3 TTD yang terserap di institusi pelayanan kesehatan.	<p>Program D3 Teknologi Transfusi Darah (TTD) adalah pendidikan yang disediakan untuk para teknisi transfusi darah oleh institusi PTTD untuk menyediakan SDM yang kompeten di bidang teknologi transfusi darah.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah lulusan program D3 TTD yang terserap, berbanding total lulusan program D3 TTD pada tahun pelaporan</p>	40%	<ul style="list-style-type: none"><li>Memantau dan mengevaluasi kualitas lulusan D3 PTTD.</li><li>Mendorong UDD PMI Kab-Kota memiliki lulusan D3 PTTD</li></ul>	MA 52-221-0001, 52-221-0007
Output 2.2.3:					
Sarana prasarana, perlengkapan, peralatan, dan bahan habis pakai tersedia secara memadai dan terstandarisasi di semua UDD.					
35	UDD Prov/Kab-Kota memiliki peralatan sesuai dengan kelas pelayanannya.	<p>Pelayanan UDD sesuai Permenkes 83 tahun 2014 terbagi atas tingkat utama, madya, dan pratama.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	100% UDD PMI Prov/Kab-Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>UDD Provinsi/Kab-Kota melakukan pengadaan sarana prasarana perlengkapan dan peralatan habis pakai sesuai panduan dan kelas pelayanannya</li><li>UDD Provinsi/Kab-Kota melengkapi peralatan sesuai dengan kelas pelayanannya</li><li>Monitoring dan evaluasi UDD PMI Kab/Kota untuk menggunakan kantong darah dan reagen sesuai standar nasional</li></ul>	MA 52-221-0001
36	UDD Prov/Kab-Kota menggunakan kantong darah dan reagen yang sesuai standar nasional.	<p>Standar nasional untuk penggunaan kantong darah dan reagen mengacu pada PP no.7 tahun 2011 dan Permenkes 83 tahun 2014 serta peraturan baru yang sedang dalam pengesahan di Kemenkes.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Total kantong darah yang sesuai standar nasional, yang didistribusikan oleh UDD PMI se Indonesia</p>	35 UDD PMI Kab/Kota dan 1 Provinsi		
Output 2.2.4					
Sistem Informasi Manajemen Unit Donor Darah ( SIMDONDAR ) berfungsi baik di semua tingkatan untuk mendukung pencatatan, pelaporan, dan penelusuran pelayanan darah.					
37	UDD Prov/Kab-Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen Unit Donor Darah (SIMDONDAR).	<p>Sistem Informasi Manajemen Unit Donor Darah ( SIMDONDAR ) adalah sistem pencatatan seluruh aktivitas pelayanan darah di UDD mulai dari vena donor sampai ke vena pasien.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	35 UDD PMI Kab/Kota dan 1 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>Mendorong UDD PMI Kab/Kota untuk menggunakan SIMUDDA/SIMDONDAR</li><li>Mengevaluasi pemanfaatan SIMUDDA/ SIMDONDAR di UDD PMI Provinsi dan Kab/Kota</li></ul>	MA 52-221-0001, 52-321-0003
38	UDD Prov/Kab-Kota mengirimkan laporan kegiatan pelayanan ke UDD Nasional melalui SIMDONDAR.	<p>Laporan kegiatan pelayanan melaporkan seluruh aktivitas di UDD, mulai dari rekrutmen donor, seleksi dan pengambilan darah, hingga pengamanan, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian darah selama setahun.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>Membina penggunaan SIMDONDAR di UDD PMI Kab-Kota</li><li>Memantau pengiriman laporan melalui SIMUDDA/ SIMDONDAR</li></ul>	

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
Outcome 2.3					
Ketersediaan darah yang aman, terjangkau dan berkualitas di semua UDD meningkat.					
39	% pedonor darah sukarela di UDD Prov/Kab- Kota yang menyumbangkan darahnya 3-4 kali dalam setahun.	Kalkulasi: Total pedonor darah sukarela yang menyumbangkan darahnya 3-4 kali dalam setahun, berbanding jumlah DDS se Indonesia	75%	<ul style="list-style-type: none"><li>Memantau pengiriman laporan kegiatan UDD PMI Prov/Kab-Kota se Jawa Tengah</li></ul>	MA 52-221-0001, 52-221-0008
40	Jumlah darah (kantong) yang dapat digunakan untuk pengobatan setiap tahun di UDD Prov/Kab-Kota.	Kalkulasi:	310.000 Kantong	<ul style="list-style-type: none"><li>UDD PMI Prov/Kab-Kota melaksanakan pengolahan darah, uji saring, dan uji silang serasi</li><li>Mengalokasi BPPD bagi Pasien Tidak Mampu</li></ul>	
Output 2.3.1:					
Upaya promosi Donor Darah Sukarela (DDS) dilakukan secara rutin dan meluas.					
41	Jumlah orang yang dijangkau dalam kegiatan promosi Donor Darah Sukarela (DDS) dalam setahun oleh UDD PMI Prov/Kab/Kota	Kegiatan promosi untuk merekrut Donor Darah Sukarela (DDS) dilakukan melalui pembuatan leaflet, tayangan iklan di media cetak, televisi, dan online di laman UDD web site, dan sebagainya.	55.000 Orang	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengelolaan mobil unit untuk UDD berupa kunjungan, monitoring, supervisi, bantuan teknis</li><li>Melaksanakan promosi dan penggalangan DDS</li><li>Mendiseminasikan dan membina materi promosi DDS</li><li>Meningkatkan jangkauan pelayanan donor darah dengan mitra secara rutin</li><li>Penghargaan terhadap Pedonor Darah 10, 25, 50, 75, dan 100kali</li><li>Membangun jejaring dengan masyarakat pemerhati Donor Darah dan Pedonor Darah</li></ul>	MA 52-221-0001, 52-221-0004, 52-221-0005
Output 2.3.2					
Sentralisasi pengolahan darah, uji saring, dan uji silang serasi dilaksanakan untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan darah.					
42	Jumlah UDD PMI Prov/Kab- Kota yang menjalankan sentralisasi.	Sentralisasi adalah upaya untuk memusatkan proses pengolahan dan distribusi darah yang ada di beberapa UDD Kabupaten/Kota menjadi satu atau beberapa sentra di Provinsi.	35 UDD PMI Kab/Kota dan 1 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan kualitas pengolahan darah, uji saring, dan uji silang serasi.</li><li>Meningkatkan kualitas manajemen UDD PMI</li><li>Memenuhi persediaan darah minimum sesuai kebutuhan setempat</li></ul>	MA 52-221-0001

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
43	Jumlah sentralisasi yang terbentuk.	Cukup jelas.	3 sentralisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi untuk membangun sentralisasi dengan UDD PMI Prov/Kab-Kota</li> <li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM UDD PMI</li> </ul>	MA 52-221-0001
<b>Output 2.3.3</b> Darah terdistribusi sesuai kebutuhan RS melalui jejaring pelayanan penyediaan darah.					
44	% permintaan darah yang rasional dan sesuai indikasi medis di RS terpenuhi di wilayah kerja UDD PMI Prov/Kab-Kota	Cukup jelas	91%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan persediaan darah minimum sesuai kebutuhan setempat</li> <li>Memantau distribusi darah yang dilakukan UDD daerah</li> <li>Memantau kebutuhan darah di RS setempat</li> <li>Mengambil dan menyimpan darah sesuai standar.</li> </ul>	MA 52-221-0001

## RENCANA OPERASIONAL 2021

TUJUAN STRATEGIS-3					
Kapabilitas Relawan PMI sebagai tulang-punggung lauanan kemanusiaan PMI di semua tingkatan meningkat secara kuantitas dan kualitas					
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
<b>Outcome 3.1:</b>					
Tatakelola Relawan (rekrutment, pembinaan, penugasan, pengembangan, penghargaan) terlaksana sesuai pedoman Manajemen Relawan					
45	% PMI Kab/Kota dengan database KSR/PMR/Relawan yang diperbaharui setiap tahunnya	<p>Adalah PMI Kab/Kota yang memperbaharui database KSR/PMR/Relawan, meliputi informasi yang tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data-data dasar individual</li> <li>Masa aktif (dari waktu rekrutment hingga data aktifitas terakhir)</li> <li>Catatan aktifitas individu (diklat ke-PM-an, penugasan)</li> <li>Catatan spesialisasi individu</li> <li>Status keaktifan individu (s/d jangka waktu 6 bulan setelah data aktifitas terakhir)</li> <li>Waktu deaktivasi individu (unsubscribe)</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab/Kota yang sudah memperbaharui database PMR/Relawan, berbanding dengan jumlah PMI Kab/Kota yang melapor.</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi sistim pencatatan data PMR/Relawan</li> <li>Pengumpulan data PMR/Relawan secara regular</li> <li>Memperbaharui database PMR/Relawan secara periodic</li> <li>Menyusun panduan-panduan kegiatan PMR dan KSR</li> </ul>	MA 52-261-0003
<b>Output 3.1.1:</b>					
Panduan manajemen PMR dan Sukarelawan (KSR dan TSR, termasuk Sukarelawan perusahaan/organisasi/ institusi) diimplementasikan di semua tingkatan.					
46	Jumlah KSR PMI Kab/Kota yang aktif dalam kegiatan selama satu tahun terakhir	<p>Adalah anggota Korps Relawan PMI Kab/Kota yang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Markas PMI Kab/Kota setempat.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah KSR PMI Kab/Kota yang tercatat ikut dalam kegiatan PMI Kab/kota selama satu tahun terakhir</p>	35 PMI Kab/Kota Se Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk dan mengaktifkan Forum Relawan</li> <li>Melibatkan KSR dalam setiap kegiatan PMI Kab/Kota</li> <li>Menugaskan KSR secara rotasi untuk penugasan Posko</li> <li>Memfasilitasi upaya-upaya innovative dikalangan Relawan</li> <li>Mencatat kegiatan Relawan untuk memperbaharui database</li> </ul>	MA 52-261-0003, 52-321-0001
47	Jumlah Relawan mitra (perusahaan, organisasi, institusi) yang dimobilisasi oleh PMI Pusat, Prov, Kab/Kota setiap tahun	<p>Relawan mitra adalah karyawan perusahaan, organisasi, institusi yang terdaftar untuk mendukung kegiatan PMI berdasarkan spesialisasi/keterampilan khusus yang dimilikinya.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	PMI Provinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjajagi, membina kerjasama dan membangun jejaring dengan korporasi</li> <li>Membangun jejaring dengan mantan KSR/TSR potensial</li> <li>Melibatkan Relawan Mitra dalam setiap kegiatan PMI</li> <li>Melibatkan KSR dalam kegiatan sosial Mitra</li> </ul>	

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
<b>Output 3.1.2:</b>					
Relawan PMI memperoleh pelatihan manajemen dan teknis/kejuruan/ketrampilan berbasis karakter dengan kompetensi ganda sesuai kebutuhan Organisasi dan Pelayanan					
48	Jumlah Relawan PMI Kab/Kota yang dilatih ketrampilan prioritas I/II/III.	<p>Adalah Relawan PMI Kab/Kota yang mengikuti pelatihan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan ketrampilan prioritas I mencakup assessment, pertolongan pertama dan evakuasi, pemulihan hubungan keluarga, komunikasi dan kehumasan.</li> <li>• Pelatihan ketrampilan pelayanan prioritas II mencakup dapur umum, pelayanan kesehatan, pelayanan ambulans, dan program dukungan psikososial.</li> <li>• Pelatihan ketrampilan prioritas III mencakup penampungan dan pengungsian, air dan sanitasi, distribusi dan relief.</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas.</p>	350 relawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleksi Relawan sesuai kategori pelatihan prioritas I/II/III</li> <li>• Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan layanan sesuai kategori pelatihan prioritas I/II/III antara lain : 1. Training Of Fasilitator Sibit ( Desa Tangguh);  2. Pelatihan CEA (Community Engagement &amp; Accountability) /Keterlibatan dan Akuntabilitas; 3. Pelatihan Konselor HIV; Training Of Trainer; 4. Latihan Gabungan (Hari Relawan)</li> <li>• Memperbaharui database Relawan</li> </ul>	<p>MA 52-261-0001, 52-261-0003, 52-261-0002, 52-261-0004</p> <p>MA 52-261-0001, 52-261-0003, 52-261-0002, 52-261-0004</p>
49	Jumlah Relawan(KSR) PMI Kab/Kota yang dimobilisasi di tingkat Provinsi/ Nasional	<p>Relawan PMI Kab.Kota terdaftar yang dimobilisasi oleh PMI Pusat/Provinsi untuk mendukung kegiatan PMI lintas daerah, baik untuk kebencanaan maupun non-bencana, berdasarkan spesialisasi, keterampilan khusus serta kompetensi yang dimilikinya.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas.</p>	350 relawan yang dimobilisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan kelengkapan administrative mobilisasi</li> <li>• Dokumentasi, kompilasi laporan Relawan yang dimobilisasi untuk pembelajaran</li> </ul>	MA 52-271-0005
<b>Output 3.1.3:</b>					
Panduan mobilisasi Relawan yang diperbaharui tersedia dan diimplementasikan					
50	Jumlah operasi kedaruratan yang dikelola oleh PMI Provinsi/Kab/Kota yang mengimplementasikan panduan mobilisasi Relawan	<p>PMI Pusat, Provinsi, Kab/Kota mengimplementasikan Panduan Mobilisasi Relawan dalam arti mensahkan dan menggunakannya dalam praktik manajemen Relawan.</p> <p>Panduan mobilisasi Relawan yang diterbitkan oleh PMI Pusat adalah panduan untuk penugasan Relawan dalam kegiatan PMI setempat dan kegiatan lintas daerah, dengan ketentuan-ketentuan yang antara lain tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur mobilisasi dan demobilisasi, termasuk briefing dan debriefing</li> <li>• Peraturan keselamatan dan keamanan bekerja di lapangan</li> <li>• Penyediaan perlengkapan APD</li> <li>• Asuransi selama penugasan</li> <li>• Transportasi dan akomodasi selama penugasan</li> <li>• Biaya penugasan Relawan</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah operasi kedaruratan yang mengimplementasikan panduan mobilisasi Relawan</p>	PMI Provinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun alat monitoring mobilisasi Relawan</li> <li>• Melakukan briefing/debriefing</li> <li>• Monitoring mobilisasi Relawan, mulai dari pra-mobilisasi, saat penugasan, hingga demobilisasi</li> <li>• Memfasilitasi kepentingan Relawan yang dimobilisasi</li> <li>• Mengupayakan penghargaan untuk Relawan (material/non- material)</li> <li>• Memfasilitasi layanan asuransi Global untuk Relawan yang ditugaskan pada Operasi kemanusiaan</li> </ul>	MA 52-261-0003

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
51	Jumlah operasi kedaruratan yang dikelola PMI Provinsi yang mengimplementasikan ketentuan keselamatan ( <i>duty of care</i> ) untuk penugasan Relawan lintas daerah	<p>Ketentuan keselamatan kerja adalah ketentuan untuk jaminan keselamatan dan keamanan Relawan yang dimobilisasi atas permintaan PMI Provinsi untuk mendukung Operasi Tanggap Darurat Bencana skala menengah-besar, dengan ketentuan tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaminan pelayanan kesehatan, bilamana ybs jatuh sakit,</li> <li>Biaya evakuasi hingga perawatan, bilamana ybs mengalami kecelakaan kerja</li> <li>Santunan, bilamana ybs gugur dalam penugasan</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah operasi kedaruratan yang mengimplementasikan jaminan keselamatan dan keamanan Relawan</p>	PMI Provinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan briefing dan debriefing</li> <li>Memberikan jaminan pelayanan kesehatan atau asuransi</li> <li>Sosialisasi buku tilik/ panduan keselamatan relawan</li> </ul>	
<b>Outcome 3.2:</b> Pendidikan karakter kepada PMR Mula, Madya dan Wira terlaksana sesuai pedoman pembinaan PMR					
52	% Unit PMR PMI Kab/Kota yang melaporkan kegiatannya ≥4 kali dalam setahun	<p>Adalah Unit-Unit PMR (Mula/Madya/Wira) yang melaporkan implementasi rencana kegiatannya kepada PMI Kab/Kota pembinaanya, meliputi kegiatan yang antara lain tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan umum extra-kurikuler di sekolah yang diinisiasi oleh Unit-Unit PMR</li> <li>Implementasi program/kegiatan PMI: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Remaja Sebaya</li> <li>Kampanye Lingkungan Hijau (green campaign)</li> <li>Sekolah Sehat</li> <li>Sekolah Siaga Bencana</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah unit PMR yang aktif melapor sedikitnya 4 kali per tahun kepada PMI Kab/Kota, berbanding dengan jumlah unit PMR PMI se Indonesia</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring kegiatan unit-unit PMR</li> <li>Dokumentasi, kompilasi laporan- laporan kegiatan PMR</li> <li>Memfasilitasi, pendampingan kegiatan PMR</li> <li>Monitoring kegiatan unit-unit PMR melalui PMI Kab/Kota</li> </ul>	MA 52-261-0003, 52-321-0001
53	%PMI Kab/Kota yang memiliki unit PMR aktif setiap tingkatan ≥3 sekolah.	<p>Adalah PMI Kab/Kota yang membina kegiatan PMR Mula/Madya/Wira di sekolah-sekolah (Dasar/Menengah) yang berlokasi di Kabupaten/Kota terkait.</p> <p>Unit PMR aktif adalah sekolah dengan unit PMR yang melaksanakan kegiatan rutin ≥1kegiatan setiap bulannya.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab/Kota dengan unit PMR aktif ≥3 unit, berbanding dengan jumlah PMI Kab/Kota yang melapor.</p>	100%		

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
<b>Output 3.2.1:</b>					
Terbentuknya unit-unit PMR di sekolah Dasar/Menengah dengan Guru Pembina PMR yang kompeten di PMI Kab/Kota					
54	Jumlah Pembina PMR PMI dengan unit PMR yang aktif dalam setahun terakhir	Adalah Guru/tenaga pendidik yang memfasilitasi kegiatan pembinaan PMR di sekolah-sekolah (dasar/menengah)  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah Guru Pembina PMR di unit-unit PMR yang aktif.	35 PMI Kab/Kota Se Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kepada Guru Pembina Unit PMR</li> <li>Memantau perencanaan kegiatan unit-unit PMR</li> <li>Mempromosikan pendekatan sebaya kepada Guru Pembina PMR</li> </ul>	MA 52-261-0001
55	Jumlah PMI Kab/Kota dengan unit PMR ≥6 unit	Unit PMR berbasis di sekolah dasar/menengah yang dibina oleh PMI Kab/Kota setempat, terdiri dari Sekolah Dasar (PMR Mula), Sekolah Menengah Pertama (PMR Madya) dan Sekolah Menengah Atas (PMR Wira).  <b>Kalkulasi:</b> Total unit PMR (Mula, Madya, Wira) yang dilaporkan oleh semua PMI Kab/Kota se Indonesia	35 PMI Kab/Kota Se Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Advokasi dan sosialisasi kegiatan PMR ke sekolah-sekolah sasaran</li> <li>Membentuk unit-unit PMR Mula/Madya/Wira di sekolah-sekolah Dasar/Menengah</li> <li>Menyusun materi KIE untuk kegiatan PMR sebaya</li> <li>Pendampingan kegiatan pendekatan sebaya PMR</li> <li>Monitoring kegiatan PMR se Jawa Tengah</li> <li>Memperbaharui sistim pencatatan untuk database PMR</li> <li>Memperbaharui database PMR se Jawa Tengah</li> </ul>	MA 52-261-0003
56	Jumlah anggota PMR se Indonesia	Anggota PMR adalah anggota unit PMR Mula, Madya dan Wira di sekolah-sekolah binaan PMI Kab/Kota seluruh Indonesia  <b>Kalkulasi:</b> Total (individu) anggota PMR yang dilaporkan oleh semua PMI Kab/Kota	35 PMI Kab/Kota Se Jateng		
57	PMI Prov/Kab-Kota melaksanakan Jumbara.	Jumbara (Jumpa Bakti Gembira) adalah sebuah acara setiap 3(tiga) tahun yang dihadiri oleh pelatih dan anggota PMR untuk berkumpul dan saling berbagi ilmu maupun pengalaman.  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas.	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai Juklak/Juknis Jumbara</li> </ul>	MA 52-261-0007
<b>Output 3.2.2:</b>					
Kegiatan Unit PMR yang unik dan inovatif didokumentasikan, didiseminasikan, replikasi/duplikasi oleh Unit PMR di wilayah lainnya.					
58	Jumlah unit PMR yang melaporkan kegiatan yang unik, inovatif setiap tahunnya	Kegiatan Unit PMR yang unik dan inovatif adalah inisiatif kegiatan Unit PMR yang tidak termasuk dalam kegiatan khas PMR  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah kegiatan Unit PMR yang unik dan inovatif yang dilaporkan ke PMI Pusat	35 PMI Kab/Kota Se Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun panduan informasi dan dokumentasi kegiatan PMR</li> <li>Memantau kegiatan PMR yang inovatif</li> <li>Melaksanakan dokumentasi kegiatan PMR secara periodic</li> <li>Promosi, sosialisasi kegiatan PMR yang inovatif</li> </ul>	MA 52-261-0003



## RENCANA OPERASIONAL 2021

TUJUAN STRATEGIS-4					
Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan penanggulangan bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya, melalui penguatan unit-unit pelayanan PMI di semua tingkatan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat.					
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
<b>Outcome 4.1</b>					
Kapasitas dan kualitas pelayanan PM di bidang kebencanaan dan pencegahan krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya meningkat dengan berpedoman pada standar layanan kemanusiaan yang universal					
59	%Penerima Manfaat yang yang memberi umpan balik positif terhadap layanan kemanusiaan PMI	Adalah Penerima Manfaat layanan PMI yang disurvei dan memberikan umpan-balik positif melalui mekanisme Community Engagement and Accountability (CEA), meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Reward/apresiasi atas layanan PMI</li> <li>Input untuk perbaikan layanan</li> <li>Informasi kebutuhan pelayanan PMI</li> </ul>	100% PMI Kab/Kota Se Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan penjangkaran umpan-balik masyarakat melalui mekanisme CEA</li> <li>Memantau umpan balik terhadap pelayanan PMI</li> </ul>	MA 52-321-0001, 52-321-0003
<b>Output 4.1.1</b>					
Tersedianya unit layanan kebencanaan, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya serta satuan spesialisasi yang profesional di PMI Pusat/Prov/Kab/Kota					
60	Jumlah PMI Kab/Kota yang memiliki satuan respons darurat kebencanaan, krisis kesehatan ≥30 orang	Adalah PMI Kab/Kota yang telah membentuk Satuan Siaga Bencana (SATGANA) dengan ≥30 orang berkompetensi atau terlatih ketrampilan tanggap darurat bencana/pencegahan krisis kesehatan, seperti: <p><b>Bantuan Manajemen Operasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kepemimpinan lapangan</li> <li>Assessment</li> <li>Logistik</li> <li>Pengelolaan Posko lapangan/aju</li> <li>Pelayanan informasi</li> <li>Pelayanan administrasi dan keuangan</li> </ul> <p><b>Bantuan dan Pertolongan korban bencana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Distribusi Relief</li> <li>Pelayanan PP dasar</li> <li>SAR dan evakuasi</li> <li>Pelayanan kesehatan,</li> <li>Bongkar-pasang tenda</li> <li>Pelayanan Dapur Umum</li> <li>Pelayanan air dan sanitasi</li> <li>Pelayanan RFL, dan • Bantuan Serbaguna/KSR</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab/Kota yang melapor (jumlah anggota dan kompetensi) berbanding dengan jumlah semua PMI Kab/Kota yang dikategorikan rawan bencana.</p>	35 PMI Kab-Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMI Provinsi mendorong PMI Kab/Kota untuk memiliki satuan respons darurat kebencanaan dan krisis kesehatan</li> <li>PMI Kab/Kota melaksanakan penugasan rotasi/piket Posko kepada anggota Tim Satgana</li> <li>Membangun dan memantapkan kapasitas Posko PMI di semua tingkatan</li> </ul>	MA 52-211-0001

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
61	Jumlah personil spesialis Tanggap Darurat PMI yang dimobilisasi pada saat bencana.	<p>Adalah Staf/KSR/TSR PMI dengan pengetahuan, praktisi, ketrampilan spesialis yang dimobilisasi oleh PMI Pusat untuk operasi bencana lintas Daerah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spesialis Medis, Paramedis</li> <li>• Spesialis Shelter</li> <li>• Spesialis WASH</li> <li>• Spesialis Psychososial</li> <li>• Spesialis Manajemen Relief</li> <li>• Spesialis Manajemen Logistik</li> <li>• Spesialis PRB</li> <li>• Lain2</li> </ul>	50 personil spesialis Tanggap Darurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan SOP pra- mobilisasi dan de-mobilisasi</li> <li>• Mobilisasi personil berkualifikasi Korlap, Pendamping, Spesialis</li> <li>• Dokumentasi personil yang dimobilisasi</li> </ul>	MA 52-321-0001, 52-211-0002
62	Jumlah PMI Kab/Kota yang merespons peristiwa darurat kebencanaan, krisis kesehatan, krisis kemanusiaan lainnya per kesempatan pertama	<p>Adalah PMI Kab/Kota yang merespons peristiwa darurat kebencanaan, krisis kesehatan atau krisis kemanusiaan lainnya (konflik, bencana industri, gagal teknologi dll yang berdampak korban massal) baik sebelum bencana terjadi dan/atau per 6 jam-pertama setelah peristiwa bencana terjadi, meliputi aksi/tindakan dini, tindakan respons awal, antara lain, tidak terbatas pada:</p> <p><b>Pra-Bencana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau prakiraan cuaca (hydro- meteorological) yang berpotensi bencana</li> <li>• Menggerakkan potensi masyarakat</li> <li>• Kerjasama strategis dengan lembaga terkait</li> <li>• Konsolidasi sumber daya TDB PMI (SDM, Alat, Dana, Sistem mobilisasi, dst)</li> </ul> <p><b>Sewaktu Bencana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengirim laporan situasi 1 x 24 jam</li> <li>• Mengkonsolidasikan anggota satuan tanggap darurat PMI setempat</li> <li>• Melaksanakan penilaian (asesmen) cepat</li> <li>• Melaksanakan koordinasi, komunikasi dengan PMI setingkat di atasnya dan lembaga terkait setempat</li> <li>• Melaksanakan distribusi air minum, air bersih, makanan siap saji (bila punya persediaan atau memiliki akses terhadap sumber-sumber yang menyediakan bantuan)</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah PMI Kab/Kota yang melaporkan aksi/ tindakan dini pra-bencana</li> <li>• Jumlah PMI Kab/Kota yang melaporkan setidaknya 3 kegiatan pada 6 jam-pertama,</li> </ul>	35 PMI Kab-Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun kerjasama strategis dengan lembaga dan kementerian pemerhati kebencanaan yang relevan.</li> <li>• Memperbaharui peta rawan bencana (PMI) secara periodik</li> <li>• Melaksanakan kajian dampak bencana secara periodic sebelum siklus kejadian bencana termaksud terjadi.</li> <li>• Mengirim laporan potensi bencana merujuk pada prakiraan situasi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang</li> <li>• Mendorong PMI Kab-Kota di wilayah rawan bencana untuk aksi/tindakan dini.</li> <li>• PMI Provinsi menerima laporan kejadian</li> </ul>	MA 52-211-0001

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
85	Jumlah Kasus RFL yang ditindaklanjuti.	Adalah kasus RFL (tidak terbatas pada bencana/konflik) yang diajukan kepada PMI dan ditindaklanjuti hingga kasus dinyatakan ditutup oleh PMI Kab/Kota atau Provinsi, dan Pusat  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah kasus RFL yang ditindaklanjuti berbanding jumlah kasus yang diajukan ke PMI Pusat/Prov/Kab-Kota	5	<ul style="list-style-type: none"><li>Memantau PMI Kab-Kota dengan kasus RFL yang dilayani</li><li>Fasilitasi tindaklanjut kasus RFL lintas kabupaten/provinsi</li></ul>	
Output 4.1.2					
Dokumen panduan/SOP untuk layanan kebencanaan, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya tersedia dan diimplementasikan					
63	Jumlah panduan/SOP/manual untuk manajemen kedaruratan tersedia di PMI Pusat.	Adalah panduan/SOP/manual, metode manajemen (tatakelola) termasuk layanan/bantuan kemanusiaan (CBI, FBA), termasuk aplikasi berbasis teknologi informasi, untuk layanan kebencanaan, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya yang ada terbaru sesuai dengan standard yang berlaku universal.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah panduan/SOP/manual manajemen/layanan kedaruratan yang diterbitkan oleh PMI Pusat.	2 panduan/SOP	<ul style="list-style-type: none"><li>Mendesiminasikan panduan/SOP/manual ke PMI Kab-Kota</li><li>Penyusunan panduan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kedaruratan</li><li>Monitoring implementasi panduan/SOP layanan kedaruratan</li><li>Rapat Koordinasi Bidang PB</li></ul>	MA 52-321-0001, 52-251-0003
64	PMI Provinsi, Kab-Kota melaksanakan simulasi kedaruratan sesuai Panduan/ SOP kedaruratan	Simulasi kedaruratan adalah kegiatan aplikasi respons kedaruratan berbasis scenario tertentu, yang dilaksanakan dalam bentuk “ <i>table-top exercise</i> ” (menguji efektifitas alur koordinasi dan komunikasi) atau “ <i>application exercise</i> ” (menguji aksi-aksi respons) yang merujuk pada panduan/SOP kedaruratan.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah kegiatan simulasi kedaruratan yang diinisiasi oleh PMI Pusat/Prov/Kab-Kota	2 simulasi	<ul style="list-style-type: none"><li>PMI Provinsi mendorong PMI Kab-Kota melakukan kegiatan simulasi kedaruratan</li></ul>	
Pelayanan kemanusiaan PMI dilaksanakan sesuai standar teknis, kualitas dan akuntabilitas yang berlaku secara universal.					
65	Jumlah laporan operasi kedaruratan yang dipublikasikan kepada pihak Donor local dan internasional	Adalah laporan kepada pihak donor sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga, yang memuat informasi tentang kemajuan implementasi, capaian-capaian target dan realisasi anggaran, yang disampaikan secara tepat waktu.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah operasi kedaruratan yang memperoleh dukungan donor yang dilaporkan/dipertanggungjawabkan	5	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan laporan situasi</li><li>Penyusunan laporan kemajuan periodic</li><li>Penyusunan laporan final</li><li>Diseminasi laporan Operasi kedaruratan</li></ul>	MA 52-321-0001, 52-271-0007

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
66	Jumlah operasi kedaruratan PMI tingkat nasional dengan layanan/ bantuan kemanusiaan sesuai standar teknis yang berlaku universal	<p>Operasi kedaruratan PMI tingkat nasional adalah operasi TDB yang memperoleh bantuan dana internasional yang dikelola oleh PMI Pusat. Standar teknis universal adalah standar kualitas, kuantitas dan akuntabilitas menurut panduan layanan/bantuan SPHERE, WHO, UNICEF, UNHCR.</p> <p>Operasi PMI adalah layanan/bantuan kemanusiaan kedaruratan dan non-kedaruratan yang memberikan layanan, tidak terbatas pada sektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan/bantuan hunian (Shelter)</li> <li>• Layanan/bantuan non-pangan (non-food items)</li> <li>• Layanan/bantuan air dan sanitasi (WASH)</li> <li>• Layanan/bantuan kesehatan (Health, PSS)</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah operasi kedaruratan dan non-kedaruratan yang mengaplikasi standar-standar teknis dalam sector-sektor layanan/bantuannya.</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong PMI Kab-Kota untuk melakukan orientasi standar teknis sector- sektor pelayanan kepada Relawan</li> <li>• Pendampingan teknis sector- sektor pelayanan</li> <li>• Monitoring implementasi sector- sektor pelayanan</li> </ul>	
67	Jumlah Penerima manfaat layanan kemanusiaan PMI terdokumentasi, terpilah menurut kategori jender dan usia	<p>Penerima Manfaat layanan kemanusiaan PMI adalah individu/keluarga/kelompok masyarakat yang menerima manfaat langsung layanan darurat bencana dan/atau krisis kemanusiaan lainnya maupun program/kegiatan lain-lain di luar situasi kebencanaan/krisis kemanusiaan lainnya, termasuk program/kegiatan berbasis masyarakat.</p> <p>Terdokumentasi adalah tercatat jumlahnya dan dipilah menurut kategori jender dan usia.</p> <p><b>Kalkulasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah total penerima manfaat layanan PMI disemua tingkatan yang tercatat</li> <li>• Penerima manfaat layanan PMI dipilah menurut kelompok jender dan usia</li> </ul>	10.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau pelaporan PMI Kab-Kota dalam pencatatan penerima manfaat layanan PMI</li> </ul>	MA 52-321-0001, 52-231-0002

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
68	Jumlah kegiatan layanan/bantuan kemanusiaan PMI yang mengelola issue jender, proteksi, inklusifisme (PGI)	<p>Issue terkait jender, proteksi dan inklusifisme adalah pertimbangan normative dan akuntabilitas yang melekat pada setiap bentuk layanan/bantuan kemanusiaan, untuk memastikan penghormatan terhadap martabat penerima manfaat (<i>dignity</i>), ketersediaan akses untuk kelompok rentan tertentu (<i>access</i>), keterlibatan penerima manfaat (<i>participation</i>), dan rasa aman (<i>safety</i>) terhadap tindakan kekerasan, pelecehan, intoleransi dll.</p> <p>Issue jender, proteksi, inklusifisme yang dikelola meliputi langkah-langkah dalam layanan kemanusiaan PMI, antara lain, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan layanan/bantuan PMI</li> <li>• Implementasi/distribusi layanan/bantuan PMI, termasuk bantuan berbasis tunai (CBI)</li> <li>• Monitoring layanan/bantuan PMI</li> <li>• Diseminasi informasi dan mekanisme umpan-balik layanan/bantuan PMI</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah kegiatan layanan/bantuan kemanusiaan PMI, kedaruratan dan non-kedaruratan, yang memperhatikan issue jender, proteksi dan inklusifisme.</p>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan kegiatan layanan/bantuan kemanusiaan PMI, kedaruratan dan non-kedaruratan, yang memperhatikan issue jender, proteksi dan inklusifisme</li> <li>• Perencanaan yang partisipatif</li> <li>• Melibatkan masyarakat/penerima manfaat dalam implementasi kegiatan</li> <li>• Monitoring, memastikan issue jender, proteksi teridentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat</li> <li>• Pendampingan kepada PMI Kab-Kota dalam memfasilitasi kelompok penerima manfaat terkait issue jender dan proteksi</li> <li>• Mendata jenis jender dalam setiap pelayanan dan kegiatan PMI.</li> </ul>	
<b>Output 4.1.4</b>					
Layanan kesehatan umum, spesialis/sub-spesialis berbasis fasilitas kesehatan tumbuh dan berkembang					
69	Jumlah PMI Kab-Kota yang menginisiasi pendirian fasilitas layanan kesehatan	<p>Fasilitas layanan kesehatan PMI adalah sarana layanan kesehatan untuk umum, memiliki ijin pendirian yang diterbitkan oleh pihak berwenang, yang dikelola oleh PMI Prov/Kab-Kota dengan layanan yang tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah Sakit Umum</li> <li>• Klinik kesehatan, umum/khusus</li> <li>• Dokter Umum</li> <li>• Apotik</li> <li>• Laboratorium pendukung diagnosis</li> <li>• Layanan hemodialisa</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Kab-Kota yang melaporkan pendirian atau pengoperasian fasilitas kesehatan.</p>	15 PMI Kab-Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi PMI Kab-Kota yang mendirikan fasilitas layanan kesehatan</li> <li>• Monitoring kegiatan fasilitas Yankes PMI Kab-Kota</li> </ul>	MA 52-221-0001, 52-231-0002

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
63	Jumlah fasilitas layanan kesehatan PMI yang memenuhi standar sertifikasi kelayakan oleh pihak berwenang	<p>Adalah fasilitas layanan kesehatan PMI yang memenuhi standar teknis dan kualitas yang disertifikasi oleh Dinas Kesehatan setempat, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki ijin pendirian/operasional dari pihak berwenang</li> <li>Ketersediaan tenaga medis/paramedic yang memadai sesuai jenis layanan dan kapasitas layanannya</li> <li>Ketersediaan ruang layanan yang memenuhi standar hygienic, layak</li> <li>Ketersediaan prosedur layanan standar</li> <li>Memiliki jaringan pelayanan rujukan</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab-Kota yang memiliki sertifikat pelayanan dari Dinas Kesehatan setempat.</p>	15 PMI Kab-Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan dokumentasi, kompilasi sertifikasi fasilitas Yankes PMI Kab- Kota</li> </ul>	MA 52-221-0001, 52-231-0002
64	Jumlah PMI Kab-Kota dengan fasilitas layanan kesehatan yang melaporkan jumlah penerima manfaatnya	<p>Penerima Manfaat adalah pengunjung yang memperoleh layanan langsung dari fasilitas layanan kesehatan PMI Kab-Kota.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab-Kota dengan fasilitas Yankes yang melaporkan jumlah penerima manfaatnya (dipilah menurut kategori umur dan jender)</p>	15 PMI Kab-Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMI Provinsi memantau pelaporan peneirma manfaat fasilitas layanan kesehatan PMI Kab-Kota</li> </ul>	
Outcome 4.2					
Kapasitas dan kualitas pelayanan PMI dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB) dan pencegahan krisis kesehatan yang berbasis masyarakat meningkat					
65	Jumlah PMI Kab/Kota memiliki setidaknya 1(satu) komunitas binaan program PRB/Kesehatan.	<p>Komunitas Binaan adalah kelompok anggota masyarakat di satuan teritorial tertentu (kelurahan, desa, dusun) yang menjadi sasaran program/kegiatan PMI berbasis masyarakat untuk upaya pengurangan risiko bencana dan/atau pencegahan krisis kesehatan dengan berbagai kegiatan dalam kategori sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengorganisir masyarakat</li> <li>Mengedukasi masyarakat</li> <li>Memberdayaan masyarakat</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab/Kota yang menyelenggarakan program/kegiatan di tingkat masyarakat</p>	2 PMI Kab-Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi PMI Kab-Kota yang berinisiatif menyelenggarakan program/kegiatan berbasis masyarakat</li> <li>Pelatihan teknis dan manajemen program/kegiatan berbasis masyarakat kepada Staf/Relawan PMI Kab-Kota</li> <li>Pendampingan teknis Relawan PMI Kab-Kota untuk implementasi program/kegiatan berbasis masyarakat</li> </ul>	MA 52-271-0007

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
66	Jumlah Penerima Manfaat langsung dari program/kegiatan PMI Kab/Kota berbasis masyarakat	<p>Adalah kelompok sasaran langsung program/kegiatan berbasis masyarakat, PRB atau pencegahan krisis kesehatan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota satuan/kelompok yang dilatih PMI</li> <li>• Penerima manfaat edukasi, sosialisasi</li> <li>• Individu/kelompok dengan inisiatif PRB atau pencegahan krisis kesehatan yang mendapat dukungan PMI</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Total penerima manfaat langsung dari program/kegiatan berbasis masyarakat yang dilaporkan oleh PMI Kab/Kota. Jumlah Penerima manfaat dipilah menurut kategori jender dan usia.</p>	2 PMI Kab-Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi penerima manfaat langsung dari semua kegiatan berbasis masyarakat</li> </ul>	MA 52-271-0007
<b>Output 4.2.1:</b> PMI Kab/kota memiliki kapasitas dalam memfasilitasi upaya kegiatan PRB dan pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat.					
67	Jumlah KSR/TSR PMI Kab/Kota yang dilibatkan dalam program/kegiatan berbasis masyarakat.	<p>Adalah KSR/TSR PMI Kab/Kota yang memperoleh pelatihan khas PRB dan pencegahan krisis kesehatan yang dimobilisasi untuk program/kegiatan PMI berbasis masyarakat seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan, edukasi kepada masyarakat sasaran</li> <li>• Pendampingan kelompok masyarakat sasaran</li> <li>• Memfasilitasi masyarakat sasaran dengan sumber-sumber pembangunan setempat</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Total jumlah KSR/TSR dari semua PMI Kab/Kota yang menyelenggarakan program/kegiatan berbasis masyarakat.</p>	110	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan pelatihan- pelatihan kepada Relawan PMI untuk kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat</li> <li>• Membangun jejaring dan hubungan strategis dengan masyarakat di wilayah rawan bencana/krisis kesehatan</li> <li>• Mengupayakan pelatihan- pelatihan tangggap bencana/krisis kesehatan kepada masyarakat binaan PMI</li> <li>• Memantau pelibatan KSR/TSR PMI Kab-Kota dalam kegiatan berbasis masyarakat</li> <li>• Pelatihan HIV/AIDS</li> </ul>	MA 52-261-0004, 52-271-0007
68	Jumlah PMI Kab/Kota yang memiliki setidaknya satu unit lembaga Pendidikan dengan kegiatan PRB, pencegahan krisis kesehatan	<p>Lembaga Pendidikan adalah sekolah dasar- menengah dan Perguruan Tinggi binaan PMI Kab/Kota yang menyelenggarakan kegiatan PRB dan/atau pencegahan krisis kesehatan, antara lain, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilisasi PMR/KSR untuk pengurangan resiko di lingkungan sekolah/kampus (untuk Pelatihan PB/PP, penyuluhan PB/Kes, inisiatif pemeliharaan lingkungan, promosi sadar bencana)</li> <li>• Menyelenggarakan simulasi tanggap darurat di lingkungan sekolah/kampus (penyelamatan diri, menyiapkan sekolah/ kampus sbg. tempat penampungan sementara)</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab/Kota dengan kegiatan pembinaan di lembaga-lembaga Pendidikan.</p>	35 PMI Kab-Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau penyelenggaraan kegiatan PMI Kab-Kota dalam pembinaan di lembaga-lembaga Pendidikan</li> <li>• Menyelenggarakan kegiatan Sekolah/Kampus Siaga Bencana</li> <li>• Menyelenggarakan simulasi bencana di sekolah/kampus dan lingkungan sekitarnya</li> <li>• Meningkatkan gerakan sadar bencana/krisis kesehatan di lembaga-lembaga pendidikan (dukungan Mitra Gerakan/ Donor)</li> </ul>	

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
<b>Output 4.2.2</b>					
Terlaksananya program-program pengurangan risiko bencana dan pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat dukungan Mitra Gerakan.					
69	Jumlah proyek berbasis masyarakat dukungan Mitra yang diimplementasi oleh PMI	Adalah proyek-proyek berbasis masyarakat di bidang kebencanaan dan/atau pencegahan krisis kesehatan yang memperoleh dukungan Mitra (Gerakan dan Non-Gerakan), baik dalam bentuk program bilateral maupun komitmen PMI terhadap global Movement Initiatives.  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	1 proyek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai rencana implementasi kegiatan</li> </ul>	MA 52-271-0007
70	Jumlah penerima manfaat langsung proyek berbasis masyarakat dukungan Mitra Gerakan	Adalah individu, keluarga atau kelompok anggota masyarakat di wilayah sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat yang memperoleh dukungan Mitra Gerakan  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	400 penerima manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai rencana implementasi kegiatan</li> </ul>	MA 52-271-0007
<b>Output 4.2.3</b>					
Terbentuknya kelompok masyarakat terlatih sebagai Mitra Strategis untuk upaya pengurangan risiko bencana dan pencegahan krisis kesehatan					
71	Jumlah kelompok masyarakat terlatih yang dibina oleh PMI Kab/Kota	Kelompok masyarakat terlatih adalah anggota masyarakat yang memperoleh pelatihan ketrampilan khas ke-PM-an, respons bencana serta krisis kesehatan yang akan menjadi ujung- tombak kegiatan PMI berbasis masyarakat.  <b>Kalkulasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah organisasi (kelompok) masyarakat terlatih per komunitas binaan PMI</li> <li>Total jumlah organisasi (kelompok) masyarakat terlatih dari semua komunitas binaan PMI</li> </ul>	85 kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong PMI Kab-Kota untuk memberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat</li> <li>Pendekatan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat yang eksis di wilayah sasaran</li> <li>Membentuk satuan siaga kebencanaan/krisisi kesehatan di tingkat masyarakat</li> <li>Introduksi kegiatan pengurangan risiko bencana dan pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat</li> <li>Melaksanakan VCA, pemetaan risiko, penyusunan rencana aksi, simulasi, mitigasi skala kecil, dll terkait PRB/pencegahan krisis kesehatan</li> </ul>	MA 52-211-0005
72	Jumlah kegiatan PRB, pencegahan krisis kesehatan di wilayah binaan PMI Kab/Kota yang diinisiasi secara mandiri oleh masyarakat	Kegiatan yang diinisiasi secara mandiri adalah kegiatan PRB, pencegahan krisis kesehatan yang direncanakan dan diimplementasikan dengan menggunakan sumber daya masyarakat sendiri, dikelola oleh masyarakat dan hasilnya digunakan oleh masyarakat itu sendiri.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah kegiatan berbasis masyarakat yang mandiri yang dilaporkan oleh PMI Kab/Kota.	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong PMI Kab-Kota dalam menyelenggarakan kegiatan berbasis masyarakat</li> <li>Memantau pelaporan kegiatan berbasis masyarakat PMI Kab-Kota</li> <li>Memfasilitasi masyarakat binaan dalam hubungannya dengan sumber-sumber potensial Pemerintah/ stakeholder setempat</li> <li>Mempromosikan kegiatan mandiri masyarakat binaan kepada Pemerintah/stakeholder setempat</li> </ul>	



[illegible]

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
<b>Output 4.3.1</b>					
Dokumen panduan/SOP dan perangkat penunjang pelayanan sosial (seperti media KIE, alat peraga, perangkat M&E) tersedia, termutakhirkan, dan digunakan di PMI.					
75	Jumlah Panduan/SOP, perangkat penunjang pelayanan sosial yang tersedia di PMI Pusat.	<p>Panduan/SOP pelayanan sosial memuat teknis pelaksanaan pelayanan sosial mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi atau penutupan. Contoh perangkat penunjang pelayanan sosial antara lain media KIE, alat peraga, dan perangkat M&amp;E.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah panduan/SOP pelayanan sosial yang diterbitkan oleh PMI Pusat</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMI Provinsi mendesiminasikan panduan/SOP pelayanan sosial yang ada</li> </ul>	MA 52-271-0005
<b>Output 4.3.2</b>					
Kegiatan-kegiatan pelayanan sosial dilaksanakan oleh staf/sukarelawan yang kompeten di PMI semua tingkatan.					
76	Jumlah Staf/Relawan PMI yang kompeten dibidang pelayanan sosial	<p>Adalah Staf/Relawan PMI yang telah memperoleh pelatihan khas Pelayanan Sosial dan dimobilisasi untuk melaksanakan kegiatan pelayanan sosial.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Staf/Relawan yang dimobilisasi untuk melaksanakan kegiatan pelayanan sosial.</p>	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMI Provinsi menyelenggarakan Pelatihan Pelayanan Sosial kepada Staf/Relawan PMI</li> <li>PMI Provinsi memfasilitasi tenaga pendamping untuk kegiatan pelayanan sosial yang diinisiasi oleh PMI Kab/Kota</li> </ul>	MA 52-231-0005

## RENCANA OPERASIONAL 2021

TUJUAN STRATEGIS-5					
Mewujudkan PMI yang berfungsi baik, dengan Kepemimpinan yang berpedoman kuat pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM dan tatakelola organisasi yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang berlaku.					
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
Output 5.1.1:					
AD/ART/PO dan aturan pelaksanaannya serta produk hukum lainnya tersedia dan diimplementasikan di semua tingkatan					
77	Jumlah Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh PMI Pusat mengacu pada AD/ART PMI	<p>Peraturan Organisasi adalah aturan-aturan setingkat di bawah AD/ART yang menjabarkan garis besar tata kelola organisasi PMI dan dapat menjadi acuan penyusunan peraturan PMI Pusat/Provinsi/Kab-Kota yang disesuaikan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepengurusan</li> <li>• Kemarkasan, termasuk issue jender dan proteksi</li> <li>• Pelayanan</li> <li>• Sumber Daya Manusia</li> <li>• Tata kelola keuangan</li> <li>• Tata kelola Aset dan Logistik</li> <li>• Kepegawaian, termasuk issue jender dan keberagaman</li> <li>• Perencanaan dan Pelaporan</li> <li>• Kemitraan</li> <li>• Pencitraan</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah dokumen final terkait dengan ketentuan hukum PMI seperti Peraturan PMI, Peraturan Organisasi dan ketentuan PMI lainnya.</p>	Th 2020 menerima PO dari Pusat dan mensosialisasikan ke Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi review, revisi Peraturan PMI/Peraturan Organisasi PMI dan ketentuan hukum terkait PMI lainnya</li> <li>• Sosialisasi Peraturan PMI/Peraturan Organisasi PMI dan ketentuan hukum terkait PMI lainnya</li> <li>• Orientasi Organisasi dan Tatakelola ke-PMI-an</li> <li>• Monitoring implementasi Peraturan Organisasi PMI</li> </ul>	MA 52-321-0001
78	Jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang menerbitkan PO daerah mengacu pada PO yang diterbitkan PMI Pusat	<p>Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh PMI Prov/Kab-Kota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PMI setempat serta mengacu, sebagian atau keseluruhan, pada produk-produk hukum yang diterbitkan oleh PMI Pusat</p> <p><b>Kalkulasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang melapor telah menerbitkan PO daerah.</li> <li>• Jumlah jenis PO yang diterbitkan PMI Prov/Kab-Kota</li> </ul>	35 PMI Kab/Kota tersosialisasi PO Pusat/Provinsi		
79	PMI disemua tingkatan melaksanakan Musyawarah setiap 5(lima) tahun tepat waktu.	<p>PMI Pusat/Prov/Kab-Kota yang melaksanakan Musyawarah selambat-lambatnya ≤3 bulan setelah masa bakti Kepengurusan berakhir.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang melaksanakan Musyawarah pada tahun pelaporan</p>	2 PMI Kab/Kota melaksanakan Musyawarah yaitu PMI Kab Banjarnegara & PMI Kab Pati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Pra-Musyawarah: konsultasi penyusunan prioritas</li> <li>• Menyusun laporan pertanggungjawaban dan kinerja kepengurusan</li> <li>• Melaksanakan Musyawarah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pati</li> </ul>	MA 52-251-0004

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
80	PMI disemua tingkatan melaksanakan Musyawarah Kerja tahunan sesuai jadwal yang ditetapkan	PMI Pusat/Prov/Kab-Kota yang melaksanakan Musyawarah Kerja sebelum pengesahan rencana anggaran Pemerintah di Kab-Kota, Provinsi dan Pusat.. <b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang melaksanakan Muker pada tahun pelaporan	35 PMI Kab/Kota terlaksana Musyawarah Kerja Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun laporan evaluasi kinerja tahun sebelumnya</li> <li>Melaksanakan Musyawarah Kerja</li> <li>Laporan kepada PMI setingkat di atasnya</li> <li>Tindaklanjuti pasca-Muker: advokasi sumber-sumber dukungan pembangunan organisasi</li> </ul>	MA 52-321-0001, 52-251-0002
81	Jumlah PMI Kab-Kota yang memperoleh orientasi ORTALA	<p>Orientasi Organisasi dan Tatalaksana adalah orientasi yang diberikan kepada Pengurus (baru) tentang praktik, prosedur dan implementasi peraturan organisasi diberbagai bidang, diantaranya, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kepemimpinan yang berpedoman pada penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Kepalangmerahan</li> <li>Penerapan Prinsip Dasar Kepalangmerahan dalam situasi norma/kedaruratan atau implementasi kerangka kerja Akses yang lebih aman (Safer Access Framework);</li> <li>Prosedur layanan pada saat normal dan kedaruratan;</li> <li>Pembagian tugas dan tanggungjawab Pengurus dan Staf dalam arti luas;</li> <li>Strategi Keberlanjutan Dukungan Organisasi untuk PMI yang tidak aktif (Business Continuity Plan);</li> <li>Hubungan PMI antar tingkatan (vertikal, horizontal);</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang memperoleh orientasi Kepengurusan PMI dari PMI Pusat, IFRC dan ICRC</p>	Ditetapkan oleh PMI Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan orientasi ORTALA pasca pelatihan PMI Pusat</li> </ul>	MA 52-241-0006
<b>Output 5.1.2:</b>					
Mekanisme konsultasi reguler antara Pengurus dan Dewan Kehormatan PMI disemua tingkatan berfungsi					
82	Pertemuan konsultasi Pengurus dan Dewan Kehormatan dilaksanakan secara reguler	<p>Pertemuan konsultasi Pengurus dan Dewan Kehormatan adalah pertemuan rutin atas inisiatif Pengurus dan/atau atas undangan Dewan Kehormatan, yang berfungsi antara lain tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai mekanisme komunikasi untuk memastikan Kepemimpinan dan tatakelola organisasi dilaksanakan sesuai dengan Pokok-Pokok Kebijakan PMI.</li> <li>Sebagai mekanisme untuk berbagi informasi tentang kinerja PMI setempat.</li> <li>Sebagai mekanisme untuk menggalang dukungan.</li> <li>Sebagai mekanisme untuk pemecahan masalah.</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah pertemuan konsultasi Pengurus dan Dewan Kehormatan yang terlaksana.</p>	4 kali se Tahun di tingkat PMI Prov. Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi PO tentang TUPOKSI Dewan Kehormatan melalui forum Musyawarah Kerja PMI disemua tingkatan.</li> <li>Sosialisasi mekanisme kegiatan konsultasi Pengurus dan Dewan Kehormatan melalui forum Musyawarah Kerja PMI disemua tingkatan.</li> <li>PMI Prov/Kab-Kota menyusun jadwal pertemuan konsultasi Pengurus</li> <li>Dokumentasi kegiatan konsultasi Pengurus dan Dewan Kehormatan</li> </ul>	MA 52-251-0003

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
Output 5.1.3.					
Kegiatan pembinaan berjenjang dalam bidang organisasi dan program dilakukan secara rutin serta sesuai kebutuhan.					
83	Jumlah PMI Kab-Kota yang menerima kunjungan pembinaan oleh PMI setingkat di atasnya minimal satu kali dalam setahun	Adalah kunjungan pembinaan dari Pengurus setingkat di atasnya saat musyawarah/musyawah kerja atau momentum lain dengan menggunakan panduan pembinaan yang ditetapkan.  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	35 PMI Kab/Kota Se Jateng	<ul style="list-style-type: none"><li>Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi antar tingkatan</li><li>Mengkoordinasikan kunjungan pembinaan (organisasi, teknis program) dengan unit PMI setingkat di atasnya</li></ul>	MA 52-251-0004
Output 5.1.4:					
Komunikasi dan koordinasi internal dan antar tingkatan PMI, termasuk lintas Prov/Kab-Kota terlaksana sesuai kerangka acuan yang disepakati					
84	Jumlah forum regional PMI Prov/Kab-Kota yang terbentuk	Forum Regional PMI adalah forum koordinasi dan komunikasi antara beberapa Provinsi atau antar Kab/Kota se-Provinsi yang dibentuk berdasarkan kedekatan geographis, kepentingan bersama, terstruktur yang disepakati dan diketahui/disetujui oleh PMI setingkat di atasnya.  <b>Kalkulasi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah PMI Provinsi dengan forum regional antar Kab/Kota se provinsi</li></ul>	3 Paguyuban Wilayah	<ul style="list-style-type: none"><li>Melakukan monitoring pelaksanaan Kegiatan regional antar Kab/Kota dalam satu Provinsi</li><li>Mengikuti/ menghadiri dan mendampingi pelaksanaan pertemuan regional secara teratur, terjadwal</li><li>Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi kerjasama regional</li><li>Sharing, sosialisasi hasil kerjasama regional</li><li>Implementasi kerjasama regional (bervariasi)</li><li>Monitoring kerjasama regional</li></ul>	MA 52-251-0004
85	Jumlah kesepakatan regional yang diimplementasikan	Adalah output kerjasama regional PMI yang ditindaklanjuti bersama dan dilaporkan kemajuan- kemajuannya dalam forum koordinasi.  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah dokumen kerjasama regional yang dilaporkan forum-forum regional.	3 Paguyuban Wilayah		
Outcome 5.2:					
Fungsi-fungsi ke-Markas-an berjalan sesuai Tupoksi terutama aspek manajemen dan administrasi dalam mendukung pelayanan kepalangmerahan					
86	% Markas PMI disemua tingkatan yang memenuhi kriteria manajemen dan administrasi yang befungsi baik	Markas PMI dengan kriteria manajemen dan administrasi yang berfungsi baik, meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>Memiliki sistim tatakelola keuangan yang akuntabel</li><li>Melaksanakan tertib administrasi yang tercatat secara sistimatis, tersimpan baik, dan dilaporkan secara teratur</li><li>Memiliki tatakelola kepegawaian yang komprehensif</li><li>Memiliki perencanaan program dan anggaran tahunan</li><li>Membuat laporan kegiatan dan periodik (bulanan, triwulan, semester, tahunan) secara tepat waktu</li></ul>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota Se Jateng Th 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>Menyusun kuestioner penilaian kapasitas organisasi/kinerja Markas</li><li>Melaksanakan penilaian kapasitas organisasi/kinerja Markas</li><li>Analisis penilaian kapasitas organisasi/kinerja Markas</li><li>Laporan hasil analisis penilaian kinerja Markas</li></ul>	MA 52-321-0001 & 52-251-0004

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki staf kompeten yang permanen dalam jumlah yang memadai</li> <li>Memiliki anggaran program dan operasional</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Markas PMI Prov/Kab-Kota dengan <math>\geq 4</math> kriteria manajemen dan administrasi yang baik, berbanding jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang mengirim mengisi kuestioner penilaian kapasitas organisasi PMI</p>			
<b>Output 5.2.1.</b>					
Tertaksananya tatakelola kepegawaian yang menyeluruh dan berorientasi pada pengembangan kompetensi staf dan kesejahteraan					
87	%PMI Kab/Kota dengan staf permanen yang digaji $\geq 4$ orang	<p>Markas PMI Kab/Kota dengan komposisi staf Markas tidak terbatas pada fungsi-fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Markas</li> <li>Penata Keuangan</li> <li>Penata Administrasi Umum</li> <li>Penata program Layanan dan Pembinaan</li> </ul> <p>Staf Markas PMI Kab/Kota yang permanen adalah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SK pengangkatan yang diterbitkan oleh PMI Kab/Kota</li> <li>Jabatan definitif serta uraian tugas yang jelas</li> <li>Gaji yang dibayarkan langsung oleh Keuangan Markas PMI Kab/Kota</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab/Kota yang menggaji staf permanen <math>\geq 4</math> orang, berbanding dengan jumlah PMI Kab/Kota yang mengisi kuestioner penilaian kapasitas organisasi PMI.</p>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota Se Jateng Th 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan struktur dan TUPOKSI unit kerja Markas</li> <li>Penetapan uraian tugas dan tanggungjawab staf Markas,</li> <li>Penetapan mekanisme koordinasi dan pelaporan sesuai TUPOKSI unit kerja</li> <li>Penetapan sistim tatausaha Markas</li> </ul>	MA 52-321-0000, 52-311-0000
88	%Markas PMI disemua tingkatan memiliki $\geq 4$ peraturan dasar tatakelola staf/kepegawaian	<p>Peraturan dasar tatakelola staf/kepegawaian, antara lain meliputi, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekrutmen</li> <li>Jenjang pangkat/ pengangkatan/ penggajian</li> <li>Penilaian kinerja</li> <li>Hak dan kewajiban pegawai</li> <li>Kesejahteraan pegawai</li> <li>Sanksi dan keputusan hubungan kerja</li> <li>Pengawasan dan pembinaan</li> <li>Pensiun/Pesangon</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Markas PMI yang memiliki setidaknya 4 peraturan dasar dari komponen peraturan kepegawaian, berbanding total Markas PMI Prov/Kab-Kota dan Pusat</p>	100% dari 35 PMI kab/Kota Se Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seleksi dan rekrutment Staf Markas sesuai kompetensi yang diperlukan</li> <li>Menetapkan mekanisme dan prosedur pemberhentian Staf dengan mempertimbangkan keberlanjutan operasional Markas</li> <li>Penetapan disiplin kinerja Staf</li> <li>Menetapkan mekanisme pelaporan issue jender dan proteksi</li> <li>Menetapkan pola rotasi (promosi, mutasi) staf</li> <li>Melaksanakan rotasi staf secara berkala</li> <li>Menetapkan peraturan penugasan untuk tugas-tugas perbantuan ke luar Markas</li> </ul>	MA 52-321-0001, 52-311-0004

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
89	Jumlah PMI Prov/Kab-Kota melaksanakan sistim penilaian kinerja staf setiap tahunnya	<p>Sistim penilaian kerja adalah mekanisme penilaian kinerja staf Markas yang dilakukan oleh pejabat setingkat di atasnya, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perilaku</li> <li>• Disiplin</li> <li>• Output pekerjaan</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota Se Jateng Th 2020		MA 52-321-0001
90	Jumlah staf Markas PMI disemua tingkatan yang berkompeten dalam bidang manajemen	<p>Adalah staf Markas PMI yang telah memperoleh pelatihan manajemen, setidaknya di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, baik dari internal PMI maupun dari lembaga eksternal, dan mengelola program/kegiatan pembinaan atau pelayanan PMI setempat</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah staf Markas PMI yang mengelola program/kegiatan pembinaan atau pelayanan PMI setempat.</p>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota Se Jateng Th 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisa kebutuhan dan pemetaan staf Markas berkompetensi teknis dan manajerial</li> <li>• Menyelenggarakan pendampingan manajemen ke-Markasan ke Kab/Kota Se Jateng</li> <li>• Menyelenggarakan pendampingan untuk staf Markas</li> </ul>	MA 52-321-0001 & 52-251-0004
91	Jumlah staf Markas PMI disemua tingkatan yang berkompeten dalam bidang teknis layanan ke-PM-an	<p>Adalah staf Markas PMI yang telah memperoleh pelatihan tekbis, antara lain, tidak terbatas pada pelatihan prioritas I/II/III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan ketrampilan prioritas I mencakup assessment, pertolongan pertama dan evakuasi, pemulihan hubungan keluarga, komunikasi dan kehumasan.</li> <li>• Pelatihan ketrampilan pelayanan prioritas II mencakup dapur umum, pelayanan kesehatan, pelayanan ambulans, dan program dukungan psikososial.</li> <li>• Pelatihan ketrampilan prioritas III mencakup penampungan dan pengungsian, air dan sanitasi, distribusi dan relief.</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah staf Markas yang memiliki setidaknya <math>\leq 3</math> jenis ketrampilan</p>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota Se Jateng Th 2020		
92	Jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang menggaji staf $\geq$ UMP setempat dengan tunjangan- tunjangan lain yang relevan	<p>Adalah staf Markas PMI Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota yang memperoleh besaran gaji pokok <math>\geq</math>UMP setempat ditambah dengan tunjangan- tunjangan lain yang relevan untuk mendukung kinerja staf.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota Se Jateng Th 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan SK tentang peningkatan gaji dan golongan secara berkala</li> <li>• Penerbitan SK tentang rotasi/promosi/mutasi jabatan fungsional staf Markas</li> <li>• Penerbitan SK tentang penyediaan tunjangan kinerja staf Markas</li> </ul>	MA 52-311-0001 & 52-311-0004

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
125	Jumlah PMI Prov/Kab-Kota dan Pusat menyediakan asuransi kesejahteraan staf	Asuransi Kesejahteraan staf meliputi, asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan yang dikontribusi oleh Markas dan Staf secara proporsional. <b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang menyediakan setidaknya 1(satu) jenis asuransi kesejahteraan Staf Markas.	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota Se Jateng Th 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerbitan SK tentang penyediaan asuransi ketenagakerjaan, kesehatan) untuk staf Markas</li> </ul>	MA 52-311-0001 & 52-311-0004
<b>Output 5.2.2</b>					
Terlaksananya sistim dan tatakelola keuangan yang akuntabel					
93	%PMI di semua tingkatan menerbitkan laporan keuangan tahunan sesuai standar PSAK 045	<p>Laporan Keuangan standar PSAK 045 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) adalah pelaporan keuangan untuk Organisasi Nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Laporan tahunan sesuai PSAK 045, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Posisi Keuangan</li> <li>Laporan aktivitas</li> <li>Laporan Arus Kas</li> <li>Laporan Realisasi Anggaran dan Varians</li> <li>Laporan Saldo Dana Proyek &amp; Unit Usaha</li> <li>Laporan Keuangan Pokok (Buku Kas-Bank, Buku Besar, Buku Uang Muka, Buku Hutang- Piutang, Buku Penerimaan/ Penjualan, Buku Stok/Inventori)</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Markas PMI Prov/Kab-Kota memiliki <math>\geq 3</math> kriteria laporan keuangan pokok, berbanding jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang mengirim mengisi kuestioner penilaian kapasitas organisasi PMI</p>	100% PMI Kab/Kota Se Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Sistim Keuangan PMI sesuai standar organisasi nirlaba (PSAK 045)</li> <li>Orientasi tatakelola keuangan sesuai standar pertanggungjawaban dana Pemerintah (merujuk pada PP UU ke-PM-an)</li> <li>Penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, tahunan</li> <li>Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan organisasi untuk Musyawarah Kerja</li> </ul>	MA 52-321-0001
94	PMI Prov/Kab- Kota dan Pusat melakukan audit eksternal setiap tiga tahun.	<p>Audit eksternal merupakan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan secara independen oleh pihak eksternal untuk memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Prov/Kab-Kota dan Pusat yang melaporkan pelaksanaan audit eksternal pada tahun pelaporan.</p>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota Se Jateng Th 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi, kompilasi bukti- bukti pertanggungjawaban keuangan sesuai periodisasi</li> <li>Seleksi auditor eksternal</li> <li>Melaksanakan audit eksternal</li> <li>Sharing laporan audit eksternal</li> </ul>	MA 52-321-0001
95	%laporan penggunaan donasi yang dipublikasikan kepada masyarakat.	<p>Laporan penggunaan donasi adalah pertanggungjawaban PMI atas penerimaan dan penggunaan donasi mitra/masyarakat yang dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah laporan donasi yang dipublikasikan, berbanding dengan jumlah mitra utama yang memberikan donasi</p>	100% PMI Kab/Kota Se Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan laporan penggunaan donasi (masyarakat, lembaga donor dll)</li> <li>Sharing, publikasi laporan penggunaan donasi</li> <li>Orientasi pengelolaan dana kedaruratan donasi dalam Wilayah Provinsi Jateng</li> </ul>	MA 52-241-0004



NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
<b>Output 5.2.3</b>					
<b>Sistim perencanaan, monitoring-evaluasi dan pelaporan melembaga</b>					
96	PMI disemua tingkatan mengoperasikan sistim informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi	<p>Sistim Informasi Manajemen (SIM) berbasis teknologi informatika adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data (mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyajikan) dalam bentuk informasi yang spesifik untuk mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja semua tahapan manajemen termasuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Markas PMI yang sudah terintegrasi dalam sistim informasi manajemen PMI yang dikelola oleh PMI Pusat.</p>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota Se Jateng Th 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMI Jateng terlibat dalam menyusun kebijakan nasional untuk digitalisasi sistim informasi manajemen dan mensosialisasikan ke PMI Kab/Kota Se Jateng</li> <li>Pengembangan sistim dokumentasi dan pengarsipan</li> </ul>	MA 52-321-0001 & 52-321-0003
97	Jumlah produk SIM PMI yang diterbitkan oleh PMI Jateng	<p>Adalah hasil pengolahan data berupa informasi yang disajikan dalam bentuk statistik dashboard, infographis, fact-sheet, flyers yang dapat diakses oleh PMI disemua tingkatan yang sudah terintegrasi dalam SIM PMI.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Jenis dan jumlah produk SIM PMI yang diterbitkan setiap bulannya</p>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota Se Jateng Th 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana penerbitan topik-topik informasi</li> <li>Seleksi informasi sesuai topik</li> <li>Penyajian informasi secara periodic</li> <li>Distribusi informasi sesuai yang diperlukan PMI Prov/Kab-Kota</li> </ul>	MA 52-321-0001 & 52-321-0003
98	PMI disemua tingkatan memiliki rencana kerja sesuai panduan	<p>Rencana kerja Setiap tahun sesuai Panduan Perencanaan dan Pelaporan adalah rencana kerja yang menggunakan format yang ditetapkan dan memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tujuan Strategis</li> <li>Outcome, indikator, dan targetnya</li> <li>Output, indikator, dan targetnya</li> <li>Kegiatan-kegiatan</li> <li>Jumlah anggaran per kegiatan dan kategorinya</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Prov/Kab-Kota mengirimkan dokumen perencanaan tahunan kepada PMI Pusat</p>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota Se Jateng Th 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana kerja tahunan PMI</li> <li>Monitoring implementasi rencana kerja tahunan PMI</li> <li>Penyusunan laporan periodic - bulanan, triwulan, semester</li> <li>Penyusunan laporan kemajuan tahunan organisasi untuk Musyawarah Kerja</li> <li>Bimbingan teknis PMER antar tingkatan</li> <li>Melaksanakan penilaian Kapasitas Organisasi/PMER</li> </ul>	MA 52-321-0001

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
99	PMI Kab/Kota mengirim laporan semester tepat waktu	<p>Laporan semester adalah laporan yang memuat 9 indikator dasar kinerja Markas, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah PMR Mula/Madya/Wira aktif selama 6 bulan terakhir</li> <li>• Jumlah KSR/TSR aktif selama 6 bulan terakhir</li> <li>• Jumlah DDS aktif yang mendonor setidaknya 2 kali dalam 6 bulan terakhir</li> <li>• Jumlah staf markas yang digaji</li> <li>• Jumlah penerima manfaat layanan darurat bencana</li> <li>• Jumlah penerima manfaat layanan non-darurat bencana</li> <li>• Jumlah pendapatan per semester</li> <li>• Jumlah belanja per semester</li> <li>• Jumlah kecamatan binaan PMI Kab/Kota</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab/Kota yang terdokumentasi dalam aplikasi Laporan Semester</p>	35 PMI Kab/Kota Se Jawa Tengah Th 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rencana kerja tahunan PMI</li> <li>• Monitoring implementasi rencana kerja tahunan PMI</li> <li>• Penyusunan laporan periodic - bulanan, triwulan, semester</li> <li>• Penyusunan laporan kemajuan tahunan organisasi untuk Musyawarah Kerja</li> <li>• Bimbingan teknis PMER antar tingkatan</li> <li>• Melaksanakan penilaian Kapasitas Organisasi/PMER</li> </ul>	MA 52-321-0001
100	PMI disemua tingkatan menerbitkan laporan tahunan realisasi rencana kerja berorientasi pada hasil	<p>Laporan Tahunan PMI Pusat/Provinsi, Kab-Kota sesuai Panduan Perencanaan dan Pelaporan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkasan Eksekutif</li> <li>• Analisis capaian program (target vs aktual)</li> <li>• Informasi Keuangan</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Prov/Kab-Kota dan Pusat yang mengirimkan laporan realisasi rencana kerja ke PMI Pusat</p>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota Se Jateng Th 2020		
101	PMI disemua tingkatan melaksanakan monitoring sesuai panduan	<p>Adalah monitoring proses, hasil, serapan dana, umpan-balik dan penerima manfaat, atas <u>kegiatan spesifik (pilihan tertentu) atau proyek</u> (bantuan donor, dana mandiri), yang dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah standar, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus pada kebutuhan informasi</li> <li>• Sistimatis berdasarkan indikator</li> <li>• Mendeteksi perubahan yang tidak terduga</li> <li>• Tepat waktu</li> <li>• Partisipatif, melibatkan stakeholder</li> <li>• Hasil monitoring, dilaporkan dan dibagikan</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Prov/Kab-Kota dan Pusat yang melakukan monitoring atas kegiatan spesifik tertentu atau proyek.</p>	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kegiatan spesifik/proyek yang diimplementasikan oleh PMI Prov/Kab-Kota</li> <li>• PMI Jateng menyediakan bantuan teknis untuk kegiatan pra- sewaktu-paska monitoring (pelatihan, penyediaan alat monitoring, bimtek/pendampingan, pelaporan)</li> </ul>	MA 52-321-0001 & 52-251-0004

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
102	PMI disemua tingkatan melaksanakan evaluasi sesuai panduan	<p>Evaluasi adalah penilaian sistimatis dan obyektif atas <b>kegiatan spesifik</b> (pilihan tertentu) atau <b>proyek</b> (bantuan donor, dana mandiri), yang dilaksanakan pada paruh-waktu atau setelah kegiatan/proyek selesai, dengan kriteria tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevansi (kesesuaian dengan kebutuhan penerima manfaat atau kepentingan organisasi)</li> <li>• Efisiensi (penggunaan sumber daya)</li> <li>• Efektifitas (capaian tujuan jangka pendek, menengah)</li> <li>• Keberlanjutan (tindak lanjut setelah intervensi selesai)</li> <li>• Penilaian dampak (perubahan yang terjadi)</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Prov/Kab-Kota dan Pusat yang melakukan evaluasi atas kegiatan spesifik tertentu atau proyek.</p>	Aktual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kegiatan spesifik/proyek yang diimplementasikan oleh PMI Prov/Kab-Kota</li> <li>• PMI Jateng menyediakan bantuan teknis untuk kegiatan pra- sewaktu-paska evaluasi (pelatihan, penyediaan alat evaluasi, bimtek/pendampingan, pelaporan)</li> </ul>	MA 52-321-0001 & 52-251-0004
<b>Output 5.3.2</b> Kurikulum pelatihan nasional yang dibutuhkan oleh internal/ eksternal dimutakhirkan oleh PMI dan diakreditasi oleh lembaga nasional (Kemenkes, Kemenakertrans, BNPB)					
103	% kurikulum pelatihan termutakhirkan	<p>Kurikulum diperbaharui sesuai dengan perkembangan pelayanan PMI dan disahkan.</p> <p><b>Kalkulasi :</b> Jumlah kurikulum pelatihan yang diperbaharui berbanding dengan jumlah kurikulum yang dibutuhkan (n=54)</p>	100%	Akreditasi Pelatihan Petugas P3K di Tempat Kerja	MA 52-321-0001

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
142	Jumlah kurikulum yang memperoleh akreditasi dari lembaga yang berkompeten	Adalah kurikulum pelatihan yang memenuhi kriteria ketulusan akreditasi oleh lembaga nasional seperti Kemenkes, Kemenakertrans dan BNPB. Kalkulasi : Cukup jelas	Kurikulum Pelatihan Petugas P3K ditempatkan kerja memperoleh akreditasi dari Kemnakertrans melalui Badiklat PMI Pusat	Pelatihan Pertolongan Pertama di Tempat Kerja dan Simulasi	MA 52-321-0001
<b>Output 5.3.3</b>					
Pelatihan-pelatihan PMI dikelola sesuai dengan panduan manajemen pelatihan					
104	Laporan pelatihan PMI Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai Juknis manajemen pelatihan	Adalah laporan pelatihan internal dan eksternal yang sesuai panduan akreditasi dan manajemen pelatihan, meliputi : - Perencanaan/analisis diklat seperti: surat pemberitahuan pelatihan, kerangka acuan, jadwal, kurikulum, form monitoring, dan evaluasi pelatihan, pelaksanaan pelatihan (Pelatih, panitia, pengendali diklat) - Pelaksanaan diklat seperti: surat permohonan akreditasi pelatihan, laporan pelatihan, laporan pelatih, biodata peserta. - Pemantauan pelatihan seperti: bentuk evaluasi reaksi, pembelajar, evaluasi harian, evaluasi akhir, standart minimum kelulusan, nilai akhir, RKTLL. Kalkulasi: Jumlah laporan pelatihan PMI Pusat/Prov/Kab/Kota sesuai dengan panduan akreditasi manajemen pelatihan.	Dokumen	- Mobilisasi Fasilitator/Pelatih sesuai prosedur - Seleksi peserta pelatihan sesuai kriteria yang diperlukan - Penyiapan materi Pelatihan, alat belajar-mengajar, tempat pelatihan dll - Melaksanakan pelatihan sesuai Kerangka Acuan Pelatihan sesuai Panduan - Memberikan umpan balik atas laporan Pelatihan	MA 52-321-0001
<b>Output 5.3.4</b>					
Standart Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) di Bidang Kemanusiaan merujuk perundang-undangan Kepalaangmerahan tersedia dan diimplementasikan					
105	Jumlah Diklat/LSP/TUK Layanan Kemanusiaan berbasis SKKNI yang diselenggarakan oleh PMI	SKKNI adalah Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan / atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Kalkulasi: Jumlah penyelenggaraan sertifikasi/ Diklat PMI menggunakan kurikulum yang merujuk pada struktur SKKNI	Aktual	- Pembentukan Tim LSP PMI - Pengembangan dokumen mutu dan skema sertifikasi - Konsultasi dengan BNSP - Pengembangan dokumen SKKNI	125.000.000

## RENCANA OPERASIONAL 2021

TUJUAN STRATEGIS-6					
Meningkatkan kapasitas PMI di semua tingkatan dalam mengelola infrastruktur material dasar (sarana-prasarana) untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan					
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
<b>Outcome 6.1</b>					
Sarana prasarana dasar pendukung kegiatan operasional dan pelayanan (seperti markas, alat-alat kerja dan komunikasi, kendaraan operasional, gudang) tersedia melalui proses pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan yang baik.					
106	% PMI Prov/Kab- Kota dengan ketersediaan sarana prasarana pendukung kegiatan operasional dan pelayanan yang memadai	<p>Adalah Markas PMI yang memiliki sarana- parasarana pendukung operasional dan pelayanan yang memadai, antara lain tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gedung Markas dengan status kepemilikan tertulis (hak milik, hak guna bangunan, sewa berbayar, pinjam-pakai, menumpang dll)</li> <li>Gedung Markas dengan minimum 4 ruangan terpisah (Ruang KaMarkas yang juga berfungsi sebagai ruang tamu atau tempat pertemuan, Ruang Keuangan, Ruang kerja Staf lain-lain dan toilet ramah jender)</li> <li>Sarana operasional bergerak (kendaraan R-2/4)</li> <li>Peralatan kerja esensial, Furniture kantor, Sarana komunikasi</li> <li>Ruangan setara tempat penampungan barang</li> <li>Peralatan standar layanan lapangan (perlengkapan penampungan, peralatan DU, peralatan PP/Evakuasi, APD)</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumah Markas PMI Prov/Kab-Kota yang memenuhi kriteria per uraian indikator, berbanding dengan total Markas PMI Prov/Kab-Kota</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan penilaian kapasitas organisasi/sarana-prasarana dengan kuesioner alat penilaian kapasitas Kabupaten - Kota</li> </ul>	MA 52-331-0001, 52-331-0002
<b>Output 6.1.1</b>					
Tersedianya sarana prasarana Markas untuk mendukung kegiatan rutin					
107	PMI Prov/Kab/Kota memiliki setidaknya tiga jenis sarana prasarana dasar operasional Markas.	<p>Sarana prasarana dasar operasional markas, tidak terabtas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meja, kursi, lemari/rak</li> <li>Komputer dengan internet</li> <li>Telepon, Fax</li> <li>Radio Komunikasi (tetap/mobile)</li> <li>Ruangan setara tempat penampungan barang</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah Markas PMI Kab/Kota yang memiliki setidaknya 3 jenis dari daftar sarana-prasarana tersebut diatas</p>	35 PMI Kab/Kota dan PMI Prov. Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan sarana pokok Gedung Markas yang memenuhi prinsip- prinsip PLA (Penciptaan Lingkungan Aman)</li> <li>Penyediaan sarana kerja [furniture, perlengkapan kantor, alat Komunikasi (telepon, fax, internet)]</li> <li>Penyediaan sarana operasional (kendaraan roda-4/2, angkutan barang)</li> <li>Penyediaan tempat penampungan barang</li> <li>Pemeliharaan sarana-prasarana Markas</li> </ul>	MA 52-331-0003

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
108	PMI Provinsi/Kab- Kota memiliki posko yang aktif/berfungsi.	<p>Adalah PMI Prov/Kab-Kota yang mengoperasikan Posko 24/7 dengan kelengkapan antara lain, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Radio komunikasi (stationer), yang berizin</li><li>Radio komunikasi (portable), yang berizin</li><li>Radio komunikasi (mobile), yang berizin</li><li>Telepon</li><li>Fax</li><li>Komputer</li><li>Data kontak person (internal dan eksternal)</li><li>Data daerah rawan bencana</li><li>Data kejadian bencana/konflik/krisis kesehatan</li></ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Markas PMI Prov/Kab-Kota yang beroperasi 24/7 dengan setidaknya 5 item kelengkapan dari daftar tersebut diatas.</p>	35 PMI Kab/Kota dan PMI Prov. Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan sarana Posko 24/7 (Loker, Rompi, Sepatu Boot, Komputer, Lemari Arsip, dll)</li><li>Penugasan rotasi Relawan untuk siaga Posko</li><li>Apel radio Komunikasi</li><li>Monitoring situasi kedaruratan</li><li>Menerbitkan laporan situasi</li><li>Pengadaan Repeater yang terkoneksi dengan 35 PMI Kab-Kota</li><li>Pengadaan saluran telfon baru untuk call center</li><li>Pemeliharaan ruang posko, LCD</li></ul>	MA 52-211-0001   

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
		Ember 100 Tikar (pcs) 100  Kalkulasi: Jumlah Gudang Strategis PMI yang melaporkan persediaan barang pada awal tahun berjalan.			
111	Jumlah operasi kedaruratan nasional PMI yang memperoleh pasokan barang dari gudang strategis PMI	Operasi kedaruratan PMI adalah kegiatan tanggap darurat bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya yang memperoleh dukungan bantuan logistik PMI Pusat. Pasokan dari gudang strategis PMI adalah jenis dan jumlah items barang yang didistribusikan dari gudang regional/zonasi provinsi.  Kalkulasi: Semua operasi kedaruratan yang memperoleh pasokan barang bantuan dari gudang strategis PMI.	35 PMI Kab/Kota dan PMI Prov. Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merumuskan sistim mobilisasi barang bantuan menurut mekanisme dukungan regional dan zonasi</li> <li>Melaksanakan distribusi barang untuk operasi bencana</li> <li>Membangun sistim distribusi barang per local outlet (khusus untuk fase darurat) dengan pemasok air minum dan makanan siap saji yang memiliki Jaringan pemasaran luas/nation-wide.</li> <li>Mengupayakan perjanjian Pra- Bencana dengan jasa angkutan laut/udara potensial, pemasok barang, distributor air minum kemasan dan makanan siap saji</li> <li>Melaksanakan simulasi mobilisasi barang bantuan menurut mekanisme dukungan regional/zonasi, distribusi perlocal outlet</li> </ul>	MA 52-211-0001, 52-211-0006
<b>Output 6.1.3</b>					
Tersedianya sarana prasarana dan perangkat pendukung layanan kebencanaan, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya yang berfungsi baik dan memenuhi standard akuntabilitas.					
112	Frekuensi mobilisasi alat utama sistim kedaruratan untuk mendukung operasi bencana	Alat utama sistim (ALUTSIS) pendukung operasi kedaruratan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Armada truk tanki air</li> <li>Armada truk ringan</li> <li>Kendaraan penjelajah (MPV)</li> <li>Kendaraan ambulans</li> <li>Perahu karet evakuasi</li> <li>Set peralatan PP korban massal</li> <li>Set peralatan APD Satgas</li> <li>Set peralatan WASH/penjernih air</li> <li>Set peralatan WASH/toilet darurat</li> <li>Set peralatan RS lapangan</li> <li>Set peralatan IT-Telekom darurat</li> <li>Set Gudang lapangan (rubhall)</li> <li>Set peralatan kerja (perkakas) lapangan</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi prosedur dan mekanisme mobilisasi/demobilisasi ALUTSIS kedaruratan</li> <li>Mengupayakan perjanjian Pra- Bencana dengan jasa angkutan laut/udara potensial</li> </ul>	MA 52-211-0001, 52-331-0002, 52-311-0003

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
		<b>Kalkulasi:</b> Jumlah kegiatan mobilisasi ALUTSIS Kedaruratan untuk mendukung operasi bencana selama tahun berjalan, terdiri dari jenis dan jumlah items ALUTSIS			
154	PMI Provinsi memiliki setidaknya lima alat pendukung operasional pelayanan darurat.	PMI Provinsi yang memiliki peralatan standard pelayanan PB yang dapat mendukung kebutuhan operasional Tim Respon bencana, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlengkapan DU lengkap untuk 500 orang</li> <li>• Perlengkapan PP (untuk Individu atau Tim)</li> <li>• Perlengkapan Evakuasi korban Korban ( ambulan, tandu)</li> <li>• Perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja (pelampung,masker, kacamata debu, helmet, sarung tangan, jas hujan)</li> <li>• Tenda Penampungan sementara + alat kelengkapannya</li> <li>• Alat-alat lapangan (Pacul, Sekop, Palu, Tali- temali)</li> <li>• Truck Pengangkut (apabila belum memiliki dimungkinkan dengan pra-perjanjian sewa)</li> <li>• Kendaraan Operasional untuk personil.</li> <li>• Unit ambulans gadar/transportasi yang sesuai dengan panduan pelayanan ambulans PMI</li> </ul> <b>Kalkulasi:</b> Jumlah Markas PMI Provinsi yang memiliki 5 items dari daftar peralatan standar PB diatas.	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan stok barang bantuan prioritas</li> <li>• Membangun kapasitas untuk pengelolaan gudang</li> <li>• Pelaporan stok barang dan aset</li> </ul>	MA 52-211-0001, 52-331-0002, 52-311-0003
113	PMI Kabupaten/Kota memiliki setidaknya tiga jenis perlengkapan tim pelayanan darurat.	PMI Kabupaten/Kota yang memiliki peralatan standard pelayanan PB yang dapat mendukung kebutuhan operasional Tim Respon bencana, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlengkapan DU lengkap untuk 500 orang</li> <li>• Perlengkapan PP (untuk Individu atau Tim)</li> <li>• Perlengkapan Evakuasi korban Korban ( ambulan, tandu)</li> <li>• Perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja (pelampung, masker, kacamata debu, helmet, sarung tangan, jas hujan)</li> <li>• Tenda Penampungan sementara + alat kelengkapannya</li> <li>• Alat-alat lapangan (Pacul, Sekop, Palu, Tali- temali)</li> <li>• Truck Pengangkut (apabila belum memiliki dimungkinkan dengan pra-perjanjian sewa)</li> <li>• Kendaraan Operasional untuk personil.</li> <li>• Unit ambulans gadar/transportasi yang sesuai dengan panduan pelayanan ambulans PMI</li> </ul>	35 PMI Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Truk Tangki di masing-masing PMI Kab-Kota</li> <li>• Perlengkapan pelayanan Shelter</li> <li>• Perlengkapan pelayanan medis</li> </ul>	MA 52-211-0002



NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
		<b>Kalkulasi:</b> Jumlah Markas PMI Kab/Kota yang memiliki 3 items dari daftar peralatan standar PB diatas.			
<b>Output 6.1.4:</b> Sarana-prasarana Diklat milik PMI tumbuh dan berkembang					
114	Jumlah PMI Provinsi Jateng dengan sarana- prasarana Diklat PMI yang memenuhi standar minimum fasilitas diklat	Standar fasilitas standar sarana-prasarana Diklat antara lain tidak terbatas pada : <ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki status hukum (terpisah dari Markas)</li> <li>Gedung diklat (ruang belajar/in door, akomodasi, area kegiatan luar ruang/out door)</li> <li>Ruangan setara kelas dengan kapasitas 30 orang</li> <li>Media peraga pelatihan (cetak, audio visual)</li> <li>Furnitures (kantor, kelas, ruang akomodasi)</li> <li>Perlengkapan kelas, media belajar</li> <li>Perlengkapan kantor (computer, printer, mesin tik)</li> <li>Perlengkapan recording (camera, handy-cam)</li> <li>Memiliki rencana pengembangan jangka panjang (bila dirancang untuk sumber pendapatan)</li> </ul> <b>Kalkulasi:</b> Jumlah Markas PMI yang mengoperasikan sarana- prasarana Diklat memiliki setidaknya 3 items dari daftar tersebut diatas	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renovasi sarana dasar untuk Diklat</li> <li>Pengadaan furniture, media belajar-mengajar dan peralatan esensial lainnya</li> <li>Membentuk tim pengelola sarana-prasarana Diklat</li> <li>Membangun sistim dokumentasi administratif, tatakelola pendapatan/pengeluaran dan kegiatan</li> <li>Membuat media promosi untuk pemasaran</li> <li>Membuat laporan kemajuan untuk pengembangan lebih lanjut</li> </ul>	MA 52-321-0001
<b>Outcome 6.2</b> Infrastruktur dasar teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) PMI disemua tingkatan tersedia dan dikelola dengan baik					
115	% PMI Prov/Kab- Kota menggunakan alamat email resmi (corporate) PMI	Institusi PMI adalah Markas PMI Pusat/Prov/Kab- Kota, UDD Pusat/Prov/Kab-Kota, termasuk UPT PMI yang telah mengimplementasikan IT-Telekom System yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan Email Corporate (institusi PMI@pmi.or.id) dan Tata cara penggunaannya</li> <li>Menggunakan Sistim Informasi dan Komunikasi PMI</li> </ul> <b>Kalkulasi:</b> Jumlah institusi PMI yang mengoperasikan Sistim Informasi dan Komunikasi PMI berbanding dengan total PMI Prov/Kab-Kota	35 PMI Kab/Kota dan PMI Prov. Jawa Tengah (100%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun kebijakan penggunaan internet korporasi (email dan messaging)</li> <li>Install software email resmi PMI untuk PMI Prov/Kab- Kota</li> <li>Mengoperasikan jaringan internet korporasi PMI.</li> <li>Monitoring penggunaan jaringan internet korporasi</li> <li>Membuat mekanisme umpan- balik untuk efektifitas jaringan</li> <li>Staf PMI di Propinsi dan Kab./Kota menggunakan Email Corporate</li> <li>Data Pengurus, Staf dan Relawan terdatabase di MIS PMI</li> </ul>	MA 52-321-0001 & 52-321-0003

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
<b>Output 6.2.1</b>					
Tersedianya infrastruktur dasar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) PMI di semua tingkatan					
116	Jumlah PMI Prov/Kab-Kota memiliki akses internet	PMI Prov/Kab-kota memiliki perangkat dasar pendukung IT-Telekom sistem yang terdiri : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer</li> <li>• Printer</li> <li>• Jaringan internet</li> <li>• Koneksi Internet umum</li> </ul> <b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang memiliki perangkat dasar pendukung IT-Telekom	35 PMI Kab/Kota dan PMI Prov. Jawa Tengah (100%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan koneksi internet untuk Markas</li> <li>• Berlangganan paket internet umum</li> <li>• Memelihara peralatan komputer dengan koneksi internet.</li> <li>• PMI Pusat memberikan advise pemeliharaan internet korporasi</li> <li>• Penyediaan Kamera untuk Perangkat Studio Mini PMI</li> </ul>	MA 52-321-0001 & 52-321-0003
<b>Output 6.2.2</b>					
Kapasitas Markas PMI disemua tingkatan dalam tatakelola informasi meningkat					
117	Personil Markas PMI semua tingkatan yang memperoleh pelatihan teknologi informasi dan komunikasi	Pelatihan teknologi informatika adalah pelatihan yang diinisiasi oleh PMI Pusat, antara lain, tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan tatakelola data dan informasi</li> <li>• Pelatihan penggunaan SIM PMI</li> <li>• Pelatihan teknis lainnya untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi</li> </ul> <b>Kalkulasi:</b> Jumlah personil Markas yang memperoleh pelatihan TI tingkat nasional.	35 PMI Kab/Kota dan PMI Prov. Jawa Tengah (100%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMI Pusat menyelenggarakan pelatihan tatakelola data dan informasi</li> <li>• Pelatihan teknis lainnya untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>• Pengembangan aplikasi dan produk IT lainnya</li> <li>• Pengembangan Aplikasi E-Office PMI Jateng</li> <li>• Develope Aplikasi Posko</li> <li>• Memperbarui Laman Informasi Stok Darah se Jateng dan mengaitkan Informasi stok Darah dan Jadwal MU di BOT Telegram pmijateng</li> </ul>	MA 52-251-0004, 52-241-0007

## RENCANA OPERASIONAL 2021

TUJUAN STRATEGIS-7					
Meningkatkan kemandirian organisasi PMI secara berkesinambungan melalui kerjasama strategis disemua tingkataninisiatif Pengembangan Sumber Daya yang innovative					
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
<b>Outcome 7.1:</b>					
Hubungan kerjasama PMI di semua tingkatan dengan pemerintah, sektor swasta, mitra gerakan, organisasi, lembaga donor nasional dan internasional, masyarakat umum serta pemangku kepentingan lainnya menguat di semua tingkatan.					
118	Jumlah mitra yang memiliki kerja sama formal lebih dari satu tahun dengan PMI Prov/Kab-Kota	Mitra PMI adalah lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, sektor publik, swasta, mitra gerakan, lembaga donor dan pemangku kepentingan lainnya yang bekerjasama dengan PMI berdasarkan kesepakatan tertulis dan berkelanjutan.  <b>Kalkulasi:</b> Kerjasama formal PMI-Mitra dengan durasi lebih dari satu tahun.	10 Mitra Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi mitra potensial</li> <li>Menindaklanjuti dan melaksanakan kerjasama</li> <li>Memfasilitasi kerjasama</li> <li>Memelihara standar kualitas, akuntabilitas dan transparansi bidang yang dikerjasamakan</li> <li>Membuat laporan kemajuan secara periodik</li> </ul>	MA 52-271-0006, 52-271-0007
<b>Output 7.1.1.</b>					
Kesepakatan tertulis antara PMI dengan pemerintah, sektor publik, swasta, mitra gerakan, organisasi, lembaga donor nasional dan internasional, serta pemangku kepentingan lainnya tersedia dan diimplementasikan di PMI semua tingkatan.					
119	Jumlah kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PMI Prov/ Kab/Kota bersama Mitra	Kesepakatan tertulis dan kesepakatan lain-lain yang setara adalah kesepakatan formal yang menjadi landasan hukum kerjasama PMI dan Mitra, yang memuat ketentuan atau rujukan isi kerjasama, antara lain, tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tujuan kerjasama</li> <li>Ruang lingkup kerjasama</li> <li>Durasi kerjasama</li> <li>Pembagian tugas dan tanggungjawab para pihak</li> <li>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> <li>Anggaran</li> </ul> <b>Kalkulasi:</b> Total kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PMI Prov/Kab-Kota	5 MoU atau PKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membina dan membangun kerjasama strategis dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah</li> <li>Membangun strategi kerjasama yang berkelanjutan dengan Mitra Gerakan</li> </ul>	MA 52-271-0006
120	Jumlah PMI Kab-Kota yang mengirim laporan hasil kerjasama kepada PMI setingkat di atasnya	Laporan kinerja hasil kerjasama yang memuat capaian-capaian kerjasama PMI-Mitra yang merujuk pada tujuan dan ruang lingkup kerjasama.  <b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas	10 dokumen laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat laporan kemajuan secara periodic</li> <li>Diseminasi laporan kemajuan kepada Mitra dan stakeholder</li> </ul>	
121	%PMI Kab-Kota yang melaporkan penerimaan tahunan $\geq 500$ juta rupiah	Cukup jelas  <b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab-Kota dengan pendapatan $\geq 500$ juta rupiah berbanding dengan jumlah PMI Kab-Kota yang melapor	100% PMI Kab-Kota se Jateng melaporkan penerimaan tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMI Provinsi mengadvokasi Pemerintah Provinsi dan DPRD tingkat-I untuk akses dana bantuan</li> <li>PMI Provinsi mengkompilasi laporan semester-1 dan 2 (informasi penerimaan) dari PMI Kab/Kota sesuai jadwal</li> <li>Mengisi kuesioner penilaian kapasitas Organisasi</li> </ul>	MA 41-131-0003

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
122	%PMI Kab/Kota yang melaporkan penerimaan tahunan Pemerintah $\geq 300$ juta rupiah	Cukup jelas <b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab/Kota dengan pendapatan $\geq 300$ juta rupiah berbanding dengan jumlah PMI Kab/Kota yang melapor.	100% PMI Kab-Kota se Jateng melaporkan penerimaan tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMI Provinsi dan PMI Kab/Kota mengadvokasi Pemerintah Kab/Kota dan DPRD tingkat-II untuk akses dana bantuan</li> <li>Menyusun laporan semester-1 dan 2 tepat waktu</li> <li>Mengisi kuestioner penilaian kapasitas organisasi</li> </ul>	MA 41-131-0003
<b>Output 7.1.2.</b>					
Terlaksananya inisiatif penggalangan masyarakat untuk mendukung kegiatan kemanusiaan PM					
123	%PMI Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan Bulan Dana	Adalah kegiatan pengumpulan dana masyarakat dengan izin dari lembaga Pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan pada periode tertentu saja. <b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab/Kota yang melaporkan kegiatan Bulan Dana berbanding dengan jumlah PMI Kab/Kota se Indonesia.	100 % PMI Kab-Kota melaksanakan Bulan Dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkoordinasikan perizinan Bulan Dana di tingkat Pusat</li> <li>Mempersiapkan perizinan Bulan Dana di daerah</li> <li>Menyelenggarakan event, promosi dan inisiatif lainnya untuk mendukung Bulan Dana</li> <li>Laporan Bulan Dana kepada PMI Provinsi</li> <li>Memberikan penghargaan kepada PMI Kab-Kota yang mengalami peningkatan</li> </ul>	MA 41-131-0001
124	Jumlah PMI Kab-Kota yang melaporkan kegiatan penggalangan dana	Laporan penggalangan dana adalah laporan rekapitulasi dana yang didapatkan PMI pada setiap event penggalangan dana, baik bersumber dari individu/kelompok individu, lembaga usaha/korporasi, lembaga donor dan lain-lain yang selanjutnya dipublikasi ke masyarakat melalui laporan atau media massa. <b>Kalkulasi:</b> Jumlah PMI Kab-Kota dan Prov yang mengirim laporan kegiatan dan hasil penggalangan dana.	35 PMI Kab/Kota melapor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat laporan kemajuan realisasi donasi secara periodic kepada pihak Donor</li> <li>Menyusun laporan final realisasi donasi yang dilaporkan kepada Donor dan dipublikasikan kepada masyarakat umum.</li> </ul>	MA 41-151-0002, 41-151-0003
<b>Outcome 7.2</b>					
Kapasitas pengembangan sumber daya dalam rangka menggalang partisipasi mitra dan masyarakat untuk mendukung keberlangsungan program meningkat					
125	Jumlah PMI Prov/Kab-Kota dengan inisiatif diversifikasi sumber pendapatan	Inisiatif diversifikasi sumber pendapatan adalah berbagai upaya PMI Pusat/Prov/Kab-Kota untuk meningkatkan pendapatan tidak terikat, antara lain, tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>Promosi kegiatan kepalangmerahan</li> <li>Pendirian unit usaha dengan status hukum terpisah</li> <li>Komersialisasi sarana-prasarana</li> <li>Jasa pelatihan khas ke-PM-an</li> <li>Kerjasama strategis</li> <li>Donasi online</li> <li>Kegiatan innovative lainnya</li> </ul> <b>Kalkulasi:</b> Cukup Jelas	18 Milyard	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerbitkan produk-produk promosi dan publikasi tentang kegiatan PMI (bencana, non- bencana)</li> <li>Memanfaatkan media mitra untuk penggalangan dana</li> <li>Melibatkan donor potensial dalam kegiatan kebencanaan</li> <li>Monitoring dana hasil donasi masyarakat untuk kegiatan PMI di semua tingkatan</li> <li>Mengupayakan inovasi, terobosan, variasi baru dalam upaya penggalangan dana</li> <li>Dokumentasi dan kompilasi data dan informasi kegiatan diversifikasi sumber pendapatan/inisiatif Pengembangan Sumber Daya PMI Prov/Kab-Kota</li> <li>Monitoring kegiatan Pengembangan Sumber Daya PMI Kab-Kota</li> </ul>	MA 41-111-0001

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
<b>Output 7.2.1</b>					
Strategi peningkatan kapasitas Pengembangan Sumber Daya tersedia dan diimplementasikan oleh PMI disemua tingkatan					
126	Jumlah stakeholders PMI Prov/Kab-Kota yang terhubung dengan inisiatif diversifikasi sumber pendapatan	<p>Stakeholders terhubung dengan inisiatif diversifikasi sumber pendapatan adalah jejaring untuk komunikasi, koordinasi, konsultasi dan kerjasama pengembangan usaha, antara lain, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat umum</li> <li>• Lembaga Pemerintah</li> <li>• Lembaga usaha/korporasi potensial</li> <li>• Lembaga usaha berbasis online</li> <li>• Donatur lokal</li> <li>• Pasar potensial yaitu sasaran produk usaha, segmen produk informasi</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah stakeholders tingkat local dan nasional yang terdata (dalam database) oleh PMI Jateng</p>	PMI Provinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jateng Th 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membina kerjasama strategis untuk pengembangan usaha dan promosi/pemasaran</li> <li>• Memfasilitasi inisiatif diversifikasi sumber pendapatan yang inovatif</li> <li>• Sharing laporan kegiatan Pengembangan Sumber Daya PMI kepada stakeholders</li> </ul>	MA 52-271-0006
<b>Output 7.2.2</b>					
Inisiatif Pengembangan Sumber Daya yang inovatif terdokumentasi, didiseminasikan dan direplikasi/duplikasi oleh unit PMI lainnya					
127	Jumlah inisiatif Pengembangan Sumber Daya yang inovatif yang disosialisasikan PMI Prov/Kab dan Kota	<p>Inisiatif Pengembangan Sumber Daya yang inovatif adalah berbagai upaya untuk menciptakan landasan, sumber daya, ruang, peluang untuk memelihara keberlanjutan program dan ketersediaan dana, antara lain tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun akseptabilitas organisasi melalui kegiatan sosialisasi, promosi, membina jejaring</li> <li>• Membangun akses yang permanen terhadap sumber-sumber Pemerintah melalui advokasi, integrasi dengan program Pemda, kerjasama strategis</li> </ul>	PMI Provinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jateng Th 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempromosikan kewirausahaan</li> <li>• Monitoring dokumentasi kegiatan Pengembangan Sumber Daya PMI Prov/Kab-Kota yang eksis</li> <li>• Menerbitkan WARTA dan media sosial informasi tentang kegiatan Pengembangan Sumber Daya PMI Prov/Kab-Kota yang eksis</li> </ul>	MA 52-251-0004, 52-321-0001
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreasi/inovasi yang atraktif untuk menggalang dukungan berupa partisipasi masyarakat, sumber daya masyarakat (dana, sarpras, fasilitasi, koneksi dll)</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Jumlah inisiatif Pengembangan Sumber Daya inovatif yang dilaporkan PMI Prov/Kab-Kota kepada Divisi Pengembangan Sumber Daya &amp; Kerjasama PMI Pusat</p>			MA 52-251-0004, 52-321-0001

NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
Output 7.2.3					
Tersedianya mekanisme berbagi pengalaman inisiatif Pengembangan Sumber Daya					
128	Jumlah kunjungan bimbingan teknis Pengembangan Sumber Daya yang dikelola oleh PMI Jateng	<p>Kunjungan bimbingan teknis adalah upaya membangun kapasitas Pengembangan Sumber Daya PMI Prov/Kab-Kota dengan kegiatan, antara lain tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan tatakelola inisiatif diversifikasi</li> <li>• Fasilitasi hubungan dengan Mitra lokal</li> </ul> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	PMI Provinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jateng Th 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisa kebutuhan pendampingan, bimtek untuk PMI Kab-Kota yang hendak mengembangkan inisiatif Pengembangan Sumber Daya</li> <li>• Memfasilitasi pendampingan, bimtek untuk personil Pengembangan Sumber Daya PMI Kab-Kota yang hendak mengembangkan inisiatif Pengembangan Sumber Daya</li> </ul>	MA 52-251-0004
129	Jumlah kunjungan studi banding yang didokumentasikan oleh PMI Jateng	<p>Kunjungan antar PMI Kab-Kota dengan pembelajaran yang dicatat dan disosialisasikan oleh bidang Pengembangan Sumber daya &amp; Organisasi PMI Prov.</p> <p><b>Kalkulasi:</b> Cukup jelas</p>	PMI Provinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jateng Th 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempromosikan PMI Prov/Kab- Kota dengan keunggulan Pengembangan Sumber Daya sebagai tempat kunjungan pembelajaran/studi banding</li> <li>• Membuat profil PMI Prov/Kab- Kota dengan keunggulan Pengembangan Sumber Daya</li> <li>• Memfasilitasi kunjungan studi banding</li> </ul>	MA 52-251-0004 & 52-321-0001